



**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU DI SMA YAYASAN PERGURUAN UTAMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

OLEH:

MUTIARA ANNISA
NIM. 37.15.3.0.41

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS ILMU TARBİYAH DAN KEGURUAN**

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731 Telp. 6615683 - 6622925 Fax. 6615683,
Email ; fitk@uinsu.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan” yang disusun oleh MUTIARA ANNISA yang telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UINSU Medan pada tanggal:

04 Juli 2019 M
1 Dzul-Qa’dah 1440 H

Skripsi telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara.

**Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan**

Ketua Prodi MPI

Sekretaris

Dr. Abdilah, M.Pd
NIP : 19680805 199703 1 002

Dr. Muhammad Rifa’i, M.Pd
NIP: 19700504 201411 1 002

Anggota Penguji

Dr. Neliwati, S.Ag, M.Pd
NIP :19700312 199703 2 002

Dr. Fridiyanto, M.Pd.I
NIP :19810619 200912 1 004

Dr. Abdilah, M.Pd
NIP : 19680805 199703 1 002

Drs. M. Adlin Damanik, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN-SU Medan

Dr. Amiruddin Siahaan, M.Pd
NIP: 19601006 199403 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mutiara Annisa

Nim : 37.15.3.041

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : **Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.**

Pembimbing : 1. Drs. M. Adlin Damanik, M.AP
2. Dr. Neliwati, S. Ag, M.Pd

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan Ijazah yang diberikan oleh UIN Sumatera Utara Medan Batal Saya Terima.

Medan, 8 April 2019

Yang Membuat Pernyataan

MUTIARA ANNISA
NIM: 37.15.3.041

Nomor : Istimewa

Lampiran : -

Kepada Yth:

Perihal : **Skripsi**

Bapak Dekan Fak.Ilm

A.n Mutiara Annisa

Tarbiyah dan Keguruan UIN

Sumatra Utara Medan

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saraneperinya untuk perbaikan skripsi Mahasiswa.

Nama : Mutiara Annisa

NIM : 37153041

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Judul : Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Dengan ini kami menilai skripsi tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Skripsi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatra Utara Medan.

Demikian saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, 11 April 2019

Pembimbing 1

Pembimbing II

Drs. M. Adlin Damanik, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Dr. Neliwati, S.Ag, M.Pd
NIP :19700312 199703 2 002



**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU DI SMA YAYASAN PERGURUAN UTAMA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam*

OLEH:

MUTIARA ANNISA
NIM. 37.15.3.0.41

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. M. Adlin Damanik, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

Dr. Neliwati, S.Ag, M.Pd
NIP :19700312 199703 2 002

Ketua Prodi MPI

Dr. Abdillah, M.Pd
NIP : 19680805 199703 1 002

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRAK



Nama : Mutiara Annisa
NIM : 37.15.3.041
Fakultas : Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Pembimbing I : Drs.M. Adlin Damanik, M.AP.
Pembimbing II : Dr. Neliwati, S.Ag, M.Pd.
Judul Skripsi : Kebijakan Kepala Sekolah Dalam
Mengembangkan Kompetensi
Profesional Guru
Di SMA Yayasan Perguruan Utama
Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru, implementasi kebijakan serta hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini memaparkan secara apa adanya yang bersifat deskriptif, dengan subjek penelitian yaitu kepala madrasah, waka bidang kurikulum, tata usaha dan guru . Dalam teknik analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yang terdiri atas, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Serta menggunakan teknik keabsahan data yaitu kredibilitas, transferability, defendability, dan konfirmability.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu guru wajib mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan, Mengikutkan guru dalam kegiatan seminar merupakan salah satu cara atau kebijakan yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi profesional guru. guru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, bahwa kepala sekolah juga mengutus guru-guru untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru, serta hambatan ada guru yang ditemukan masih tidak mengikuti peraturan serta tidak disiplin, terlambat dengan banyak alasan padahal sudah ada sanksi bagi yang terlambat Serta juga faktor yang penghambatan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru adanya guru yang kurang atau rendah dalam menguasai IT sehingga segala tugasnya terkait dengan IT itu terbengkalai masih perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pembinaan. untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru atau kemampuan dari guru.

Kata kunci: *Kebijakan Kepala Sekolah, Kompetensi Profesional Guru.*

Pembimbing I

Drs. M. Adlin Damanik, M.AP
NIP. 19551212 198503 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skrini berjudul: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan wawasan dalam penyusunan kalimat atau tata bahasa dan ejaan yang dipakai. Penulis juga menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, doa dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Teristimewa penulis sampaikan kepada kedua orang tua Ayahanda tercinta Jumarlan, dan Ibunda tercinta Suharni yang senantiasa mengasuh, membimbing, menyayangi, mendo'akan, dan memberikan motivasi yang hebat bagi penulis hingga penulis bisa menyelesaikan program Sarjana Starta Satu saarjana Pendidikan Islam (S.Pd) program studi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Sumatera Utara Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara Medan serta seluruh pimpinan dan staf Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kemudian Drs. Adlin Damanik, M.AP selaku pembimbing I, dan Ibu Dr. Neliwati S.Ag,M.Pd. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Kepada keluarga tercinta untuk abang tercinta dan kakak tercinta penulis Aulia Abdul Rahman, Jihan Hana Tahira, Hafizuddin Al ansari, mbk Artika sari, Nenek, Buk Nining, Bang Andre, Kak Atika siswoyo S.Pd yang selalu memberi semangat, dorongan dan dukungan kepada penulis. Kelurga Lima puluh dan keluarga medan yang selalu memberikan dukungan motivasi kepada penulis.
4. Para Sahabat Arama Adilatul Farabi : Ukhti Rohimah, Ukhti Aisyah, Ukhti Isti, Ukhti Lilis, Ukhti Anggi, Ukhti Maya, Ukhti Lelis, Ustadzah Umi, Ustadzah Fitri, Ukhti Sonia
5. Kepada Bapak Abdillah M.PdselakuKetuaJurusan Program StudiManajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara besertasegenapjajarannya yang senantiasa memberikan motivasi-motivasi serta arahan dalam urusan penyelesaian skripsi penulis.
6. Kepada Pembina Asarama Adilatul Farabi yaitu Ustad Abdul Kholik, S.Pd, M.Si yang Senantiasa Memberikan Motivasi dalam Penyusunan Skripsi ini agar Segera Selesai.
7. Kepada Suami Saya Tercinta Yaitu Mas Bima Mahdi, S.P yang selalu memberi semangat, dorongan, doa dan dukungan kepada penulisdalam menyelesaikan skripsi ini, dan senantiasa mendorong penulis untuk selalu maju.
8. KepadaDrs.M. AdlinDamanik, M.AP, selaku Penasehat Akademik terhomat dan tercinta yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
9. BapakdanIbudosen yang telahmendidikpenulisselamamenjalanipendidikan di FakultasIlmuTarbiyahdanKeguruan UIN Sumatera Utara Medan.
10. Kepada seluruh pihak SMA Yayasan Perguruan Utama Medan Jln. Suluh No 30 A Kec. Sidorejo hilir Kab. Medan Tembung Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, Bapak Mohd, Fadhli Said, S.Pd. M.Pd selaku Guru Agama Islam. dan para guru-guru SMA Yayasan Perguruan Utama Medan serta staf pegawai, dan para siswa yang telah memberi izin serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.

11. Seluruhteman-temanseperjuangan yang salingmendorong, mengajak, danmemotivasiantarasatusamalain, yaitu keluarga besar MPI-3 2015
12. Seluruhteman-teman KKN UIN SU, remaja dan masyarakat Kota Binjai Selatan Desa TanahSeribuKec. Binjai Selatan yang senantiasamemberikansemangat, dan dorongan dalam penyusunan skripsi.
13. Teristimewa sahabat terkasih: Khoirun Niswah Harahap, Khoirun Nisa Triana, Khoirun Nisa Nst, Bella Kris Indriyani, Risa Novelia, Khusnul Khotimah, Lidan, Desy, Dini Maghfiroh Saputri, Dian Varisca, Diyah Fitri, Rahmad Syahbdin Ritonga, Saiful Bahri Lubis, Rizqo Adhani Simanjuntak menjadi tempat bertukar pikiran, berbagi suka maupun duka, serta memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan senantiasa mendorong penulis untuk selalu maju.

Semoga Allah SWT, membalas semua amalan ibadah yang telah dilakukan dengan ikhlas atas bantuan dan bimbingan pihak- pihak tersebut selama penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini melainkan Dia Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada semua pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran atas kesalahan - kesalahan dalam penulis ini. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya dan saya ucapkan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN

SURAT KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATAPENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan	14
1. Kebijakan Pendidikan	24
2. Tujuandan Kebijakan Pendidikan Nasional	26
3. Kebijakan Kepala Sekolah	28
B. Kepala Sekolah	30
1. Pengertian Kepala Sekolah.....	30
2. Fungsidan Tugas Kepala Sekolah	32
3. Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesional	34

C. Kompetensi Profesional Guru.....	42
1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru	42
2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru	46
3. Kemampuan Profesional Guru	48
4. Ciri- ciri Profesional Guru	51
5. Syarat-syarat Guru Profesional	54
6. Kewajiban Guru Praofesional	56
D. Kajian Penelitian Yang Relevan	57

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Teknik Pengumpulan Data	62
D. Subjek Penelitian	64
E. Teknik Analisis Data.....	65
F. Tehnik Penjamin Keabsahan Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. TemuanUmumPenelitian	69
1. Sejarah Singkat SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	69
2. Visi, Misidan Tujuan SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	70
3. KeadaanSiswa SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	71
4. Struktur Organisasi di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	73
5. Keadaan Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	74

6. Saranadan Prasarana yang ada di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	76
B. Temuan Khusus Penelitian	79
1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru	79
2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru	83
3. Hambatan yang dihadapi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru	87
C. Pembahasan Hasil Penelitian	91
1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	91
2. Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	93
3. Hambatan yang di hadapi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	96
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
 DAFTAR PUSTAKA	101
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	73
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Peserta Didik SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	71
Tabel 2 Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Yayasan Perguruan Utama Medan	74
Tabel 3 Sarana dan Prasarana di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	76
Tabel 4 Rekap Keseluruhan Sarana Ruang Kelas di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.....	76
Tabel 5 Jumlah Barang Keseluruhan	77
Tabel 6 Total jenis barang keseluruhan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat (1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa yang diatur dengan undang-undang RI. Untuk itu seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.¹

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Secara bahasa definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²

Dalam Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut

¹ Undang-Undang Dasar RI 1945, pasal 31 ayat 1 dan 3. (Jakarta: Permata Press, 2009), hal. 33

² Undang-undang sisdiknas (*sistem pendidikan nasional*) No.20 Thn.2003. (Jakarta: Rineka Cipt, 2010)

menuntut penataan manajemen dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan serta mutu tenaga pendidikan sesuai dengan standar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat segera terwujud termasuk kebijakan kepala sekolah dalam memimpin dan mengatur kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja guru, pada akhirnya meningkatkan prestasi belajar peserta didik.³

Menurut Wahjosumidjo, kepala sekolah adalah : “Seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.”⁴

Kepala sekolah memegang peranan penting dalam mengelola sekolah, Ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berlangsungnya proses pembelajaran di suatu sekolah. Seorang kepala sekolah dituntut untuk mampu memberikan ide-ide cemerlang, memprakarsai pemikiran yang baru di lingkungan sekolah dengan melakukan perubahan maupun penyesuaian tujuan, sasaran dari suatu program pembelajaran. Sebagai pemimpin, seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat menjadi seorang inovator. Oleh sebab itulah kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat signifikan sebagai kunci keberhasilan bagi proses pembelajaran yang berlangsung di suatu sekolah.

Pendidikan yang baik adalah yang berkonsep pada penciptaan tenaga manusia yang berdasarkan pada pemahaman nilai nilai dalam berkehidupan dan

³ Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

⁴ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 83

berkesinambungan, atau yang bersifat jangka panjang dan bukan jangka pendek dan bukan bersifat sementara.

Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran dan guru merupakan faktor utama atau penentu dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Karena, hakikat guru adalah untuk mendidik. Pengembangan profesional gurutentu saja harus fokus pada guru sebagai pelaksanaan pembelajaran, menyiapkan seperangkat pembelajaran, guru dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawab sebagai tenaga pendidik .

Sebagai tenaga pendidik profesional, guru di tuntut untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi terkait dengan bidang pekerjaannya dalam memberikan pelyanan bagi kepentingan pendidikan serta dalam membuat seperangkat pembelajaran.

Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Jika pemimpin lamban dan ragu-ragu dalam bertindak, anak buah akan melihat bahwa pemimpin tersebut adalah pemimpin yang tidak berani mengambil resiko.

Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Keberhasilan sekolah adalah merupakan salahsatu usaha dari kepala madrasah. Dimana kepala sekolah tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Sekolah sebagai unit pelaksana teknis yang membutuhkan pengelolaan dengan baik. Oleh karena itu, kepala sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan harus berfikir strategik dan analitik demi kemajuan-kemajuan sekolah, menentukan visi dan misi, tujuan dan sasaran serta membina kepemimpinan yang baik disekolah.

Kepala sekolah harus mampu menjadi contoh bagi para tenaga kependidikan yang ada disekolahnya. Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, kebijakan kepala sekolah yang terjadi di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan adalah :

1. Dimana kepemimpinan kepala sekolah disini cenderung pada melaksanakan tindakan- tindakan yang selalu menyerap aspirasi bawahannya. Hal ini terbukti saat rapat kerja SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, dewan guru dilibatkan langsung dalam menyusun program untuk kemajuan pendidikan.
2. Tidak gegabah dalam bersikap dan mengambil keputusan, selalu mengakomodasi seluruh kekuatan yang ada secara obyektif, hal ini pula bisa dilihat adanya komunikasi langsung antara guru dengan kepala sekolah baik secara individu maupun kelompok.
3. Setiap ada suatu permasalahan selalu di diskusikan atau di musyawarahkan kepada bawahan, kepala sekolah meminta pendapat atau masukan-masukan dari bawahan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan dan tindakan pengambilan keputusan kepala sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru.

Adapun masalah yang sering terabaikan pada satu lembaga pendidikan dewasa ini adalah rendahnya persiapan seorang tenaga pendidik dalam mempersiapkan seperangkat pembelajaran, dan tanggung jawab akan tugas atau amanah yang telah menjadi kewajiban, yang harus di jalankan.

Kebijakan dan tindakan pengambilan keputusan kepala sekolah merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan tingkat kemampuan dan keterampilan tenaga pendidik dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru.

Adapun masalah yang sering terabaikan pada satu lembaga pendidikan dewasa ini adalah rendahnya persiapan seorang tenaga pendidik dalam mempersiapkan seperangkat pembelajaran, dan tanggung jawab akan tugas atau amanah yang telah menjadi kewajiban, yang harus di jalankan.

Berdasarkan observasi di awal peneliti menemukan masalah mengenai adanya guru yang tidak profesional dalam mengemban / melaksanakan tugas profesional nya seperti berkas- berkas, seperti Perangkat Pembelajaran yaitu : RPP, Prota, Prosem, Silabus di sekolah masih ada yang bermasalah dan tidak lengkap, ketika tim supervisor datang kesekolah para guru kebingungan karena baru sibuk mencari Seperangkat Pembelajaran RPP, Prota, Prosem, Silabus.

Kewajiban yang diemban guru adalah kemampuan dasar untuk menjalankan tugas secara profesional. Guru harus menguasai dan mengetahui materi yang harus diajarkan, mempunyai kemampuan menganalisis materi yang diajarkan dan menghubungkannya dengan konteks komponen-komponen secara keseluruhan, mengetahui dan dapat menerapkan berbagai pendekatan dan metode pembelajaran sesuai kebutuhan, disamping juga mengetahui dan trampil

memanfaatkan berbagai media dan alat pembelajaran yang relevan dengan bahan ajar yang akan diajarkan.⁵

Menjadi tenaga Pendidik yang profesional tidak akan terwujud begitu saja tanpa adanya arahan, tanggung jawab serta kebijakan dari atasan yang baik yaitu dari seorang Pemimpin Sekolah yaitu Kepala sekolah. Serta untuk mewujudkan keprofesionalisme seorang tenaga pendidik atau guru dalam mengelola dan Mengembangkan kompetensi keprofesionalan seorang guru serta mengelola kinerja atau kemampuan seorang tenaga pendidik untuk lebih meningkatkan, dan mengelola tanggung jawab sebagai seorang tenaga pendidik atau disebut guru.

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena Kepala sekolah Sebagai Manajerial, yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mengelola, mengembangkan sekolah, memimpin sekolah dan Kepala sekolah juga berhubungan langsung dengan kegiatan dan pelaksanaan program pendidikan sekolah, dan kepala sekolah yang menjadi tolak ukur maju atau tidaknya sekolah.

Ketercapaian suatu tujuan Pendidikan sangat bergantung pada kecakapan, kebijakan serta dari peran kepala sekolah dalam mengelola, memimpin, meningkatkan, mengembangkan agar pendidikan sekolah menghasilkan mutu yang baik, meliputi SDM (Dumber Daya Manusia), serta hasil kinerja seorang guru.

Kepala sekolah merupakan pimpinan pada lembaga yang dipimpinnya, maju dan berkembangnya suatu lembaga tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab

⁵ Muhaimin, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda karya, 1993), hal. 170.

kepala sekolah. Pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada dilingkungannya pada situasi tertentu agar orang lain mau bekerja dengan rasa penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.⁶

Kepala Sekolah merupakan manajer pada organisasi kependidikan. Salah satu tugasnya adalah pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan. Kebijakan Kepala Sekolah akan dijadikan haluan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya kebijakan kepala sekolah. Kebijakan Kepala Sekolah dapat berupa suatu keputusan tertulis maupun tidak tertulis dari seorang Kepala Sekolah dalam mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah

Keberhasilan kepala sekolah dalam pelaksanaan program kebijakan diatas tersebut, diasumsikan merupakan hasil dari kerja keras dan kepiawaian kepala sekolah dalam membuat kebijakan-kebijakan operasional dalam meningkatkan profesionalitas guru. Asumsi ini bertolak dari kerangka pikir bahwa kunci keberhasilan pendidikan di sekolah/madrasah pada dasarnya bergantung pada kebijakan kepala sekolah/madrasah dalam meningkatkan profesionalitas guru dan didalam melaksanakan suatu kepemimpinan pendidikan dan cara bertindak.⁷

Di dalam suatu lembaga pendidikan, seorang yang sangat berperan peting untuk sekolah tersebut paling utama adalah kepala sekolah, dimana kepala

⁶ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Raja PT Raja Grafindo Persada. 2007), hal. 83

⁷ Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009), hal. 216.

merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh untuk memajukan, dan mengembangkan mutu pendidikan sekolah .

Sebagai Pemimpin lembaga Pendidikan, kepala sekolah memiliki kegiatan kegiatan yang kompleks, baik, maju, berkembangnya suatu sekolah untuk semua itu tergantung kepada kepala sekolah, karena pada dasarnya kegiatan kepala sekolah atau tugas kepala sekolah adalah sebagai Manajerial, yaitu kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha dalam mengelola, mengatur , mengawasi dan membawa perubahan menjadi lebih baik, serta cakap terhadap pengambilan keputusan.

Sebagai Sebuah “Usaha”, maka pendidikan dipahami sebagai suatu fakta manajemen. Karena untuk menciptakan pendidikan yang bermutu atau baik maka perlu adanya kegiatan dalam mengelola, mengatur serta mengevaluasi serta juga adanya dalam pengambilan keputusan, pembuat keputusan.untuk memajukan pendidikan harus perlu kita pikirkan faktor yang turut mempengaruhi terjadinya peningkatan pada kompensasi yang harus kita berikan kepada para pendidik atau pengajar. Secara Teoretis, di bidang apapun kompensasi menjadi penting terlebih dahulu di bidang pendidikan karena lembaga pendidikan di pandang sebagai produsen jasa pendidikan yang menghasilkan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, serta karakter.

Akan tetapi ada sebagian yang menjadi permasalahan di lembaga pendidikan yaitu kurangnya profesionalitas yang dimiliki oleh seorang tenaga pendidik, serta rendahnya kebijakan dari kepala sekolah untuk menangani hal atau permasalahan. Terdapat sebagian guru yang rendah dalam kompetensi profesional, serta permasalahan saat ini yang harus kita atasi bersama adalah mengenai hal

masalah rendahnya kualitas para pengajar di lembaga pendidikan di sekolah sekolah indonesia.

Oleh karena itu, sekolah memerlukan seorang pemimpin yang efektif dalam penentuan kebijakan dalam pendidikan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan usaha kerjasama serta memelihara iklim yang kondusif dalam kehidupan organisasi.⁸

Adapun kebijakan kepala sekolah sebagai pemimpin juga sebagai supervisor dan administrator pendidikan disekolah yang dipimpinnya, karena kepemimpinan merupakan panutan bagi bawahannya, maka pemimpin harus bersifat positif dan demokratis terhadap kepemimpinannya, karena kepala sekolah dalam mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan dituntut agar proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai kebijakan yang digunakan kepala sekolah di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, dan untuk itu maka diperlukan adanya kebijakan dari kepala sekolah yang kuat. Kebijakan ini sangat penting karena di dalam kebijakan kepala sekolah terdapat beberapa cara dalam meningkatkan kompetensi Profesional guru yang ditanamkan dalam kegiatan belajar mengajar. Bertolak dari pendapat tersebut, terlihat bahwa tuntutan akan pentingnya kebijakan kepala sekolah dalam rangka mengembangkan kompetensi profesional guru didasarkan pada kompetensi, status, tugas, dan fungsi kepala sekolah (*principle planing*).⁹

⁸ Fakultas Tarbiyah UIN Malang, *El-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* (Malang: Jurnal, 2007), hal. 67.

⁹ Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005), hal. 140

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru harus dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu yang disebut standar kompetensi. Standar kompetensi guru dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan”.¹⁰

Lebih lanjut dinyatakan bahwa standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan bidang pendidikan.¹¹

Pekerjaan seorang guru adalah merupakan suatu profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan biasanya dibuktikan dengan sertifikasi dalam bentuk ijazah. Profesi guru ini memiliki prinsip yang dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- 4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- 5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- 6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

¹⁰ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), hal. 93.

¹¹ *Ibid*, hal. 94.

- 7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat.
- 8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹²

Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari dan amanah yang telah jadi tanggung jawab seorang guru atau tenaga pendidik.

Berdasarkan Observasi awal di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan peneliti menemukan masalah Bahwa :

- 1) Terdapat guru yang kurang mampu menyusun perangkat pembelajaran
- 2) Terdapat guru yang kurang mampu melaksanakan proses pembelajaran
- 3) Rendahnya rasa Tanggung Jawab guru dalam melaksanakan tugas

Berdasarkan masalah fenomena tersebut, Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan. Dalam hal ini judul penelitian yang diangkat adalah “**Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan**”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru

¹² Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008), hal. 96.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus di atas yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan?
2. Bagaimana Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan?
3. Apa saja Hambatan yang di hadapi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui :

1. Untuk mengetahui Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan kompetensi profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan yang dilakukan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

E. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai kebijakan kepala sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi profesional guru.
- 2) Sebagai referensi penelitian yang sejenis mendatang.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru mengenai kebijakan kepala sekolah terkait dengan pengembangan kompetensi profesional guru.
- 2) Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan pedoman dalam membuat dan menentukan kebijakan, sehingga dapat mengembangkan kompetensi profesional guru.
- 3) Bagi guru, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan kompetensi guru
- 4) Bagi orang tua, dan masyarakat untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru untuk mendidik dan membimbing peserta didik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah terjemahan dari kata “*Wisdom*” yaitu suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang atau kelompok orang Artinya wisdom atau kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya. Pimpinan yang arif sebagai pihak yang menentukan kebijakan, dapat saja mengecualikan aturan yang berlaku kepada seseorang atau sekelompok orang, jika mereka tidak dapat dan tidak mungkin memenuhi aturan yang umum tadi, dengan kata lain dapat dikecualikan tetapi tidak melanggar aturan.¹³

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar yang menjadi garis dasar yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁴

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya

¹³ Syaiful Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Cv. Alfabeta. 2005), hal. 97

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 149

sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.¹⁵

Sedangkan Andreson mengemukakan bahwa kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.

Istilah lain yang dianggap sama dengan istilah kebijakan adalah kebijaksanaan. Sering diperdebatkan apa perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan, ini terjadi karena dua kata ini sama-sama belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia tetapi kedua kata ini belum disepakati penggunaannya. Tetapi untuk sementara banyak para ahli menggunakan istilah policy diterjemahkan menjadi kebijaksanaan dan kata wisdom diterjemahkan menjadi kebijakan.

Implikasi kebijakan berdasarkan pengertian dan pendapat di atas maka dapat disimpulkan dan mempersyaratkan kepada dua hal, Pertama; Sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Berdasarkan dari sudut pandang pendidikan maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional melalui dunia pendidikan.

Jadi dapat penulis simpulkan dari penjelasan di atas mengenai kebijakan kebijakan adalah kemahiran, kepamdaian, kecakapan seseorang dalam bertindak dengan cara membuat putusan dan mengambil keputusan dan suatu sistem

¹⁵ Syaiful Syagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.97

kumpulan perencanaan perencanaan dan seperangkat keputusan yang mempedomani pemikiran dalam mengambil sebuah keputusan

Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.¹⁶

Kebijakan (*wisdom*) adalah kepandaian, kemahiran, kebaksanaan, kearifan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan atas suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena sesuatu alasan kuat.¹⁷

Dalam rangka melaksanakan dan menetapkan suatu kebijakan pendidikan pada sebuah sekolah perlu menggunakan berbagai macam model kebijakan pendidikan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Adapun model pendekatan yang diperlukan dalam menetapkan suatu kebijakan pendidikan di sekolah antara lain ;

Model pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan (baik ilmu pengetahuan murni maupun terapan) untuk menerangkan sesuatu gejala yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁸ Sedang menurut Cohn model deskriptif adalah pendekatan positif

¹⁶ Imron Ali, *Kebijkasanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*,(Jakarta: Bumi Aksara. 2008), hal. 16.

¹⁷ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*,(Bandung: Cv. Alfabeta. 2005), hal. 97

¹⁸ Ace Suryadi , H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (Cet. II: Jakarta: 1994), hal. 46.

yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan menyajikan sesuatu *“State of the art”* atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan perludiketahui para pemakai.¹⁹Menerangkan kebenaran tentang suatu gejala bukanlah merupakan hal yang mudah karena gejala yang terjadi di dalam masyarakat atau sekolah selalu dapat ditafsirkan secara subjektif, dan sangat bergantung kepada pandangan subyek yang sedang menyoroti gejala tersebut. Sehingga tujuan model pendekatan deskriptif ini sedang menyoroti gejala tersebut. Sehingga tujuan model pendekatan deskriptif ini ialah mendeskripsikan suatu kebijakan menggunakan prosedur atau cara untuk penelitian dalam ilmu pengetahuan baik murni maupun terapan untuk menerangkan suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat.

a. Model Normatif

Menetapkan dan pengambilan suatu putusan atau kebijakan dengan menggunakan model normatif di mulai dari mengidentifikasi apa yang dilakukan oleh kepala sekolah atau pemimpin yang baik, dan kemudian memberikan pedoman tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Pendekatan dengan model normatif dalam menganalisis dan menetapkan kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil kebijakan/keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil kebijakan atau keputusan tersebut dapat memecahkan suatu masalah kebijakan. Informasi yang normatif atau persepektif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesuai, baik dengan argumentasi teoritis

¹⁹ Syaiful Sagala, *op.cit.*, hal. 104

maupun data dan informasi. Pengambilan kebijakan/keputusan harus mengikuti proses dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Apakah ada syarat kualitas, misalnya suatu putusan harus lebih rasional dari yang lain?
- 2) Apakah pengambil putusan mempunyai cukup informasi?
- 3) Apakah masalahnya berstruktur?
- 4) Apakah diterimanya putusan oleh bawahan merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan putusan?
- 5) Apakah diambil putusan sendiri (oleh pimpinan) dan dia yakin bahwa akan diterima oleh bawahannya?
- 6) Apakah bawahan merasa memiliki tujuan yang akan dicapai dengan pemecahan masalah itu? ²⁰

Tujuan pendekatan ini ialah membantu mempermudah para pemakai dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan suatu masalah. Pendekatan model normatif yang digunakan analisis kebijakan adalah yang dapat membantu menentukan tingkat kapasitas pelayanan yang optimum. Model normatif tidak hanya memungkinkan analisa atau pengambil kebijakan memperkirakan nilai masa lalu, masa kini, dan masa datang. Tetapi pendekatan ini dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan/kebijakan (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Kepala Sekolah) memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan dapat

²⁰ Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*, (Cet.I ; Bandung : Alfabeta: 2008), hal. 168.

memecahkan suatu masalah kebijakan.²¹ Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang (aksi) yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada semua jenjang dan jenis pendidikan.

b. Model Verbal.

Model verbal (Verbal models) dalam kebijakan diekspresikan dalam bahasa sehari-hari, bukan bahasa logika simbolis dan matematika sebagai masalah substantif. Pengambil kebijakan (analisis) menggunakan model ini bersandar pada penilaian nalar untuk membuat prediksi dan menawarkan rekomendasi.²²

Penilaian nalar inilah yang menghasilkan argumen kebijakan, bukan berbentuk nilai-nilai angka pasti. Keterbatasan model verbal, walaupun mudah dikomunikasikan dan biayanya lebih murah adalah bersifat implisit atau tersembunyi sehingga sulit dipahami, memeriksanya secara kritis argumen-argumen tersebut sebagai keseluruhan karena tidak didukung oleh informasi atau fakta yang mendasarinya.

c. Model Simbolis.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dengan pendekatan model simbolis berarti menggunakan simbol-simbol matematis untuk menerangkan hubungan antara variabel-variabel kunci yang dipercaya mencirikan suatu masalah. Prediksi atau solusi yang optimal dari suatu masalah kebijakan diperoleh dari model-model simbolis dengan meminjam dan menggunakan metode-metode matematika, statistik, logika. Model simbolis dapat memperbaiki

²¹Ibid. Hal. 105.

²² Ibid. Hal. 106.

keputusan kebijakan, tetapi hanya jika premis-premis sebagai pijakan penyusunan model dibuat eksplisit dan jelas. Model simbolis ini memang agak sulit dikomunikasikan di antara orang awam, termasuk para pembuat kebijakan, dan bahkan diantara para ahli sering terjadi kesalah pahaman tentang elemen-elemen dasar dari model simbolis tersebut. Kelemahan praktis model simbolis ini adalah hasilnya tidak mudah diinterpretasikan, bahkan diantara para spesialis, karena asumsi-asumsinya tidak dinyatakan secara memadai. Oleh karena itu penentuan kebijakan atas dasar angka-angka kuantitatif (simbolis) tidak cukup memadai untuk melakukan prediksi sehingga masih perlu fakta-fakta atau data kualitatif yang riil sebagai pertimbangan prediksi dan juga penentuan kebijakan.²³

d. Model Prosedural.

Model prosedural menampilkan hubungan yang dinamis antara variabel-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan. Prediksi dan solusi solusi optimal diperoleh dengan mensimulasikan dan meneliti, seperangkat hubungan yang mungkin terjadi Model prosedural adalah mensimulasikan hubungan antara anatara variabel-variabel kebijakan dan hasil. Model prosedural berbeda dengan model simbolis yang menghubungkan antara variabel kebijakan dengan hasil. Model prosedural juga dapat ditulis dalam bahasa nonteknis yang mudah dipahami sehingga memperlancar komunikasi antara orang-orang awam, sifatnya kreatif tetapi biayanya relatif tinggi dibanding dengan verbal dan simbolis.²⁴

e. Model sebagai Pengganti dan Perspektif.

²³ Ibid. Hal.106

²⁴Ibid. Hal. 107.

Pendekatan model perspektif merupakan upaya ilmu pengetahuan menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai memecahkan suatu masalah khususnya masalah kebijakan.²⁵ Preskripsi atau rekomendasi diidentikkan dengan advokasi kebijakan, yang dipandang sebagai cara membuat keputusan ideologis atau menghasilkan informasi kebijakan yang relevan dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai solusi-solusi yang memungkinkan bagi masalah publik. Jadi, pengambilan kebijakan bukan atas kemauan atau kehendak para penentu kebijakan, tetapi memiliki alasan-alasan yang kuat dan kebijakan tersebut memang menjadi kebutuhan publik.

Model bentuk perspektif juga biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data.²⁶ Model pengganti diasumsikan sebagai pengganti dari masalah-masalah substantif. Model pengganti mulai disadari atau tidak dari asumsi bahwa masalah formal adalah representasi yang sah dari masalah yang substantif. Sedangkan model perspektif didasarkan pada asumsi bahwa masalah formal tidak pernah sepenuhnya mewakili secara sah masalah substantif. Hal ini penting karena pemecahan masalah pendidikan ini harus dilakukan dengan tepat, jika tidak tentu akan mendapatkan kerugian baik waktu, material, dan juga penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Sehubungan dengan kebijakan atau kebijaksanaan pendidikan tidak terlalu jauh berbeda dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang pendidikan. Carter V. Good memberikan pengertian kebijaksanaan pendidikan yang dikutip oleh Ali Imron.

“Educational policy is judgement, derived from some system of values and some assessment of situational factors, operating within institutionalized

²⁵Ibid. Hal. 108

²⁶Ace Suryadi, H.A.R Tilaar, op.cit.,Hal.47.

*education as a general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives”.*²⁷

Artinya:kebijaksanaan pendidikan adalah sebagai suatu pertimbangan terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional; pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga; pertimbangan tersebut merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Sebagaimana penjelasan di atas maka kebijaksanaan adalah sebagai suatu proses, tak terkecuali ketika melihat kebijaksanaan pendidikan, yaitu sebagai suatu proses di mana pertimbangan-pertimbangan itu mesti diambil dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga. Dalam melakukan pertimbangan ada dua hal yaitu sistem nilai yang berlaku dan faktor-faktor situasionalnya. Pertimbangan kedua faktor akan menghantarkan pencapaian tujuan pendidikan ketika dirumuskan berupa perencanaan umum sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan/keputusan pendidikan termasuk keputusan kepala sekolah. pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Sebagaimana penjelasan di atas maka kebijaksanaan adalah sebagai suatu proses, tak terkecuali ketika melihat kebijaksanaan pendidikan, yaitu sebagai suatu proses di mana pertimbangan-pertimbangan itu mesti diambil dalam rangka pelaksanaan pendidikan yang bersifat melembaga. Dalam melakukan pertimbangan ada dua hal yaitu sistem nilai yang berlaku dan faktor-faktor

²⁷ Carter V.Good, Educational Dictionary, (New York:McGraw Hill Book Company, 1959) Hal. Lihat juga Ali Imron,op.cit. Hal. 18.

situasionalnya. Pertimbangan kedua faktor akan menghantarkan pencapaian tujuan pendidikan ketika dirumuskan berupa perencanaan umum sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan/keputusan pendidikan termasuk keputusan kepala sekolah.

Kata “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah. Kebijakan lebih berat menekankan pada tindakan atau (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan bisa diartikan sebagai:

- 1) suatu penggarisan suatu ketentuan-ketentuan; yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara, dan atau sasaran.
- 2) bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok saha yang berorganisasi; sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.

Sedangkan menurut *Gamage* dan *Pang* menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih, pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program.²⁸

Kerja bagi pelaksanaan program Pendapat lain yang dikemukakan oleh Klein dan Murphy mengatakan bahwa kebijakan adalah “seperangkat tujuan-tujuan, prinsip prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu

²⁸ Syafaruddin, *Evektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Efektif*, (Jakarta: Rineka, 2008), Hal. 74

organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi”.

Selanjutnya *Nichols* menyatakan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.²⁹

Bogue dan *Saunders* menyimpulkan bahwa kebijakan menjelaskan sasaran umum organisasi yang berisikan alasan bagi eksistensi dan menyediakan arah pembuatan keputusan bagi pencapaian sasaran.³⁰

Menurut Syafaruddin, dalam suatu kebijakan pendidikan terdapat tiga tahap kebijakan yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Kepala sekolah sebagai petugas yang profesional diuntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari kebijakan pendidikan tersebut.³¹

1. Kebijakan (*policy*) Pendidikan

Dalam buku Analisis kebijakan Pendidikan, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.³²

²⁹ *Ibid-75*

³⁰ *Ibid-76*

³¹ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* .(Jakarta : Rineka Cipta, 2008). hal.81-88

³² Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 135

Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli:

- a) Pendapat *Eaulau* dan *Prewitt* dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.³³
- b) Pendapat *Duke* dan *Canady* dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu: 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.³⁴

³³ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hal. 37

³⁴ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 3

- c) Pendapat *Koontz* dan *O'Donell* dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.³⁵

Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya

Kebijakan Pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pencapaian kedua pesan konstitusi untuk pendidikan nasional dijabarkan di dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut direncanakan dapat diwujudkan atau dicapai melalui lembaga lembaga sosial (*sosial institutions*) atau organisasi dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal.³⁶

2. Tujuan dan Kebijakan Pendidikan Nasional

Tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional seperti yang di rumuskan dalam UU dan dijabarkan dari UUD 1945.

³⁵ Syaiful Syagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, .. hlm.97

³⁶ Dr. H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009). hal. 7

Ada dua tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tersirat di dalam UUD 1945. Adapun tiga tahapan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendidikan yang mecerdaskan Kehidupan Bangsa.
- b) Pendidikan adalah hak seluruh Rakyat

Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya bukan bertujuan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam dunia modern atau hanya menjadi pekerja-pekerja dari industri industri yang di biayai oleh modal asing, tetapi bangsa yang cerdas adalah bangsa yang berdiri sendiri. Inilah bangsa yang merdeka yang dapat memanfaatkan sumberdaya alam dan sumber kebudayaan Indonesia yang kaya raya untuk meningkatkan mutu kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan pendidikan nasional didalam rangka ini adalah suatu proses pemerdekaan manusia arus globalisasi ataupun hanya berpangku tangan dan bersikap masa bodoh terhadap perubahan-perubahan yang besar didalam kehidupan sehari-hari tetapi merupakan seorang pribadi yang sadar akan identitasnya sebagai bangsa Indonesia serta bertanggung jawab atas kehidupannya bersama-sama dengan bangsa lain didalam kesetaraan dan ikut menjaga perdamaian dunia.

Manajemen Pendidikan nasional Indonesia merupakan berbagai upaya untuk memantapkan tercapainya tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan pendidikan Nasional yang pada hakikatnya bertujuan melestarikan

negara kesatuan Republik Indonesia yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.³⁷

a) Formulasi Kebijakan

Formulasi adalah perumusan atau pembuatan. Jadi, formulasi kebijakan adalah pembuatan/perumusan suatu kebijakan dalam pendidikan.

Berikut adalah tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan:

1. Penyusunan agenda, yakni disini menempatkan masalah pada agenda pendidikan.
2. Formulasi kebijakan, yakni merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.
3. Adopsi kebijakan, yakni kebijakan alternatif tersebut diadopsi/diambil untuk solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
4. Implementasi kebijakan, yakni kebijakan yang telah diambil dilaksanakan dalam pendidikan.
5. Penilaian kebijakan, yakni tahap ini tahap penilaian dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan dalam kebijakan pendidikan.³⁸

b) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktifitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud ke dalam

³⁷ Dr. H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009). hal. 4-6

³⁸ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* .(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 81-82.

prakteknya/realisasinya. Maka dari itu perlunya ada penerapan dalam setiap kebijakan yang dibuat. Dan tugas dari seorang manajer atau pemimpin adalah bagaimana dalam memberikan penerapan kebijakan terhadap pendidikan dan organisasi untuk dapat mewujudkan tujuannya.

3. Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan kepala sekolah. Sebelum kita mengetahui makna dari kebijakan kepala sekolah terlebih dahulu kita harus mengetahui makna dari kebijakan itu sendiri. Menurut Indrafachrudi sebagai penulis buku kebijaksanaan pendidikan di Indonesia mengatakan bahwa kebijakan adalah *wisdom*. Sedangkan kebijaksanaan adalah *policy*.³⁹ Kebijakan adalah suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada seseorang karena adanya alasan yang dapat di terima untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku.⁴⁰ Sedangkan kebijaksanaan (*policy*) adalah aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut. Sedangkan menurut *Gamage* dan *Pang* menjelaskan kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut Dalam Kamus Bahasa

³⁹Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 16

⁴⁰ *Ibid.*, 17.

Indonesia, kata kebijakan berarti prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk menjamin didalam usaha untuk mencapai sasaran.⁴¹

Sedangkan kebijakan yang dapat peneliti pahami yaitu : suatu prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk menjamin dalam usaha untuk mencapai sasaran terkait dengan kebijakan kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi profesional guru .

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional. Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggung jawab dalam menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan pemerintah. Berawal UUD 1945, undang undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, intruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh langsung keperluan *stakeholders* pendidikan, khususnya anak didik. Jadi, setiap kebijakan harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasaan masyarakat.

Untuk mencapai peningkatan mutu sekolah, maka kepala sekolah sebagai petugas profesional dituntut untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakannya pendidikan.⁴² Kebijakan sekolah termasuk dalam kebijakan pemerintah dalam pendidikan. Dalam Beare dan Boyd dijelaskan bahwa ada lima jenis kebijakan pendidikan, mencakup :

⁴¹ Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, Cet IV. 2007), hal.149.

⁴² Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* .(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 117-118

- 1) Penataan atau penyusunan tujuan dan sasaran lembaga pendidikan,
- 2) Mengalokasikan sumber daya untuk dan pelayanan pendidikan,
- 3) Menentukan tujuan pemberian pelayanan pendidikan,
- 4) Menentukan pelayanan pendidikan yang hendak diberikan,
- 5) Menentukan tingkat iventasi dalam mutu pendidikan untuk memajukan pertumbuhan eknomi.

B. Kepala Sekolah

1. Pengertian Kepala Sekolah

Secara etimologi, kepala sekolah merupakan padanan dari *School principal* yang bertugas menjalankan *principalship* atau kepala sekolahan. Istilah kepala sekolahan, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Selain sebutan kepala sekolah ada juga sebutan lain, yaitu administrasi sekolah (*School Administration*), pimpinan sekolah (*School Leader*), Manajemen sekolah (*School Manajer*), dan sebagainya.

Kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu “kepala” dan “sekolah”. Kata “kepala” dapat diartikan ketua atau pemimpin organisasi atau lembaga. Sementara “sekolah” berarti lembaga tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi, secara umum kepala sekolah dapat diartikan sebagai guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Wahjosumidjoyang dikutip Hasan Basri dalam buku *Kepemimpinan Kepala Sekolah*.⁴³ Mengartikan bahwa Kepala sekolah sebagai seorang tenaga Fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin sekolah tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tepat terjadinya interaksi antara guru yang memberi⁴⁴ pelajaran dan siswa yang menerima pelajaran.

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar dan mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas suatu pertimbangan.⁴⁵ Maka siapapun yang diangkat menjadi kepala sekolah, maka harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan tertentu seperti latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas sesuai dengan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah.⁴⁶

Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkan menjadi kompeten atau kemampuan dalam menjalankan wewenang. Tugas dan tanggung jawabnya. Pengetahuan keterampilan dan

⁴³ Basri Hasan. 2014. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2003), hal.40

⁴⁴ Ibid. *Basri Hasan*. hal 41

⁴⁵ Wahjosumidjo. 2005. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: tinjauan teoritik dan permasalahannya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 83

⁴⁶ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 *tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah*

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam menjalankan tugas tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab.

2. Fungsi Dan Tugas Kepala Sekolah

Aswarni sujud, Moh. Saleh dan Tatang M Amirin dalam bukunya “administrasi Pendidikan” menyebutkan bahwa fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijakan sekolah.
- b) Pengatur tata kerja sekolah, yang mengatur pembagian tugas dan mengatur
- c) pembagian tugas dan mengatur petugas pelaksana, menyelenggarakan kegiatan.
- d) Pempervisi kegiatan sekolah, meliputi: mengatur kegiatan, mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana.⁴⁷

Tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah;

- a) Perencanaan sekolah dalam arti menetapkan arah sekolah sebagai lembaga pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian.
- b) Mengorganisasikan sekolah dalam arti membuat struktur organisasi, menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing-masing staf.

⁴⁷ Daryanto, *administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 81

- c) Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan membimbing semua staf dan warga sekolah.
- d) Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar pendidikan dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving baik secara analitis sistematis maupun pemecahan masalah secara kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.⁴⁸

Di dalam hadist Hr. Bukhari dan Muslim telah di jelaskan bahwa mengenai tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi, pada dasarnya setiap kita adalah pemimpin. Setiap yang kita kerjakan untuk semua itu kita bertanggung jawabkan di hari akhir kelak.

“Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

Dari penjelasan Hadist diatas, dapat penulis simpulkan bahwa kepala sekolah harus bertanggung jawab atas terlaksanakannya seluruh program pendidikan di sekolah. Untuk dapat merealisasikan semua tugas dan fungsi kepemimpinannya maka kepala sekolah hendaknya, karena tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat besar guna mewujudkan mutu pendidikan yang baik dan berkualitas. kepala sekolah adalah pemimpin atau manager di dunia pendidikan, yang memiliki rencana untuk sekolah meliputi

⁴⁸ Hari Sudrajat, *Manajemen Peningkatan mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2004), hal 112.

⁴⁹ Sumber: *1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)* - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

dan menetapkan visi misi dan tujuan sekolah serta membuat peraturan peraturan, kebijakan untuk sekolah.

Sebagai kepala sekolah, maka kepala sekolah harus mengetahui manajemen operasional sekolah dan mampu untuk membuat kebijakan yang tepat, serta mampu mengambil keputusan yang bersifat memperlancar dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus memberikan rangsangan kepada guru serta personal pendidikan lainnya untuk mengusahakan peningkatan dan pengembangan pendidikan.

3. Kepala Sekolah dan Pengembangan Profesional

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah dalam melaksanakan peran dan tugasnya memanfaatkan, menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi sekolah. Keefektifan dan kebermutuan kinerja ditentukan oleh ketersediaan, kecukupan dan mutu sumber daya yang dimiliki. Sumberdaya yang menjadi aktor dari kegiatan organisasi adalah SDM pendidikan yang ada di sekolah dimana guru (Staf) menjadi SDM utama yang menopang terlaksananya kinerja organisasi sekolah. Guru merupakan SDM inti yang terlibat langsung dalam urusan utama sekolah yaitu pembelajaran.

Peningkatan mutu pembelajaran, sekolah akan terus menjadi sia-sia tanpa adanya dukungan mutu guru yang memadai juga jumlahnya, dan terus berkembang seiring tuntutan perubahan.⁵⁰ Oleh karena itu menjadi tugas

⁵⁰ Suharsaputra Uhar. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan (Mengembangkan Spirit Entrepreneurship Menuju Learning)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), hal. 174

kepala sekolah untuk berupaya meningkatkan mutu melalui peningkatan kompetensi sebagai bagian dari pengembangan profesional guru, dimana ini merupakan bagian penting dalam upaya untuk terus meningkatkan mutu efektivitas pembelajaran.

Pengembangan profesional guru menjadi tuntutan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan ditambah lagi dengan upaya untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga administrasi/staf yang bekerja dalam memberi dukungan bagi terselenggaranya proses pendidikan pembelajaran di sekolah. Kemampuan kepala sekolah dalam melakukan pengembangan profesional secara efektif, bermutu serta berkelanjutan menjadi pondasi kuat bagi makin meningkatnya proses pendidikan pembelajaran di sekolah.

a. Pengertian pengembangan Profesional (*Professional Development*)

Pengembangan profesional (*Professional Development*) merupakan pengembangan dan atau peningkatan kompetensi sebagai kemampuan profesional yang akan memberikan kontribusi pada berkembangnya kemampuan/kompetensi SDM, yang pada akhirnya akan berdampak pada makin meningkatnya kualitas kinerja SDM bersangkutan. Pengembangan profesional merupakan kegiatan organisasi dengan dukungan individu untuk mengembangkan SDM yang ada dalam organisasi. Pengembangan profesional pada dasarnya bersifat melekat pada individu yang melaksanakan pekerjaan profesional, sebagai bentuk akuntabilitas profesi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Adapun pengertian pengembangan profesional dalam konteks pendidikan adalah :

Professional development can be defined as a career-long process in which educators fine-tune their teaching to meet needs (Maggioli, 2004: 5)

This type of professional development is a set ongoing activities that increase the capacity or knowledge and skill of teacher and administrator to improve their practice and performance (Hoy and Miskel, 2005)

High Quality professional development refers to rigorous and relevant content, strategies, and organizational supports that ensure the preparation and career-long development to teacher and principals whose competence, expectations, and actions influence the teaching and learning environment. (Lunenburg, Irby, 2006)

Pengembangan profesional pendidikan merupakan kegiatan yang tiada henti, suatu pengembangan sepanjang karir sebagai guru atau kepala sekolah guna meningkatkan kompetensi profesional sehingga kemampuan melaksanakan tugas makin baik dan bermutu, yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan/ pembelajaran sebagai proses dalam konteks organisasi menjadi tugas yang harus dilakukan kepala sekolah dalam konteks manajemen SDM Pendidikan.

b. Misi kepala sekolah dalam Pengembangan Profesional Guru

Sebagai kepala sekolah yang bertanggung jawab pada terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran kelas di sekolah, maka berbagai kebijakan perlu dilakukan untuk dapat terus mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu kepala sekolah mempunyai tugas agar pengembangan profesional untuk meningkatkan

kompetensi guru pada gurulah yang mengelola dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam suatu interaksi langsung dengan siswa. Lunenburg dan Irby menyatakan

There are two missions of the principals related to professional development. First, there is the mission the principal must accomplish as it relates to her teachers' professional growth, and second, there is the mission the principal must attend to as it relates to her own professional growth.

Kepala sekolah mempunyai dua misi penting yang harus dilakukan yaitu mengembangkan profesi guru dan pengembangan profesional diri sebagai kepala sekolah. Pengembangan profesional diri sebagai kepala sekolah merupakan tuntutan profesi. Kepala sekolah dapat melakukannya dengan melakukan belajar mandiri (Self Managed Learning) tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. Di samping itu kepala sekolah dapat melakukannya melalui cara berdiskusi dengan pengawas, dan kepala sekolah lain dapat mendorong berfikir reflektif atas praktek kepemimpinan mereka.

Misi kepala sekolah dalam pengembangan profesional yang terkait langsung dengan peningkatan mutu pendidikan/ pembelajaran adalah pengembangan profesional guru. Meskipun punya sandaran individu dimana guru dapat melakukan kegiatan dalam meningkatkan kompetensinya, namun kepala sekolah harus mendorong dan melaksanakan upaya meningkatkan kompetensi guru secara sistematis terencana dan bersifat *schoolwide*, sehingga pengembangan profesi guru menjadi gerakan bersama di lingkungan guru-

guru di sekolah. Dalam pengembangan profesional guru, kepala sekolah berkewajiban untuk merencanakan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk keterlaksanaanya.⁵¹

a. langkah dan model pengembangan profesional guru

Dalam tahap penyusunan perencanaan pengembangan profesional kepala sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Analisis kebutuhan (need analysis), analisis kebutuhan dilakukan pada 3 level kebutuhan yaitu analisis kebutuhan untuk tingkat organisasi sekarang dan kebutuhan masa depan, analisis operasional adalah analisis kebutuhan kelompok pekerjaan atau posisi spesifik, dan analisis individual adalah analisis kebutuhan individu dalam melakukannya, kepala sekolah dapat mendiskusikannya dengan para guru untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan baik secara individu maupun kolektif, dimaksudkan agar materi pengembangan profesional sesuai dengan kompetensi-kompetensi guru tidak hanya sekedar dilaksanakan namun juga dapat dilaksanakan secara efektif karena sesuai dengan kebutuhan para guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, juga harus jelas kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Disamping itu model pengembangan profesional yang akan dilakukan juga didiskusikan sesuai dengan kemungkinan dan yang bisa dipilih dari umum diterapkan adalah sebagai berikut :

1. The Individual Guided Model.
2. The Observer/ assesment Model
3. The Development / Imprivert Process Model

⁵¹ Ibid, 176

4. The Training Model

5. The Inquiry Model

1. *The Individual Guided Model*, Mendorong kegiatan pengembangan profesional pada tingkatan individu. Guru merancang sendiri pengalaman belajarnya serta menentukan tujuannya, ini merupakan berbasis kemandirian di mana guru berperan sebagai manusia pembelajar.
2. *The Observer/ assesment Model*, Guru menerima umpan balik, biasanya dari rekan sejawat, atas kinerjanya dikelas.
3. *The Development / Imprivert Process Model*, mendorong guru merancang kurikulum atau terlibat dalam perbaikan sekolah proses pembuatan keputusan.
4. *The Training Model*, mengikuti pelatihan pelatihan, lokakarya yang terkait dengan peningkatan kemampuan dalam menjalankan tugas profesinya.
5. *The Inquiry Model*, meminta guru mengidentifikasi masalah pembelajaran yang menariknya, atau dapat perhatian khusus, kemudian menelitinya dengan mengumpulkan data, dan melakukan perubahan dalam pembelajaran berdasarkan interpretasi data yang diperoleh.⁵²

b. Fokus Pengembangan

Guru dituntut menjalani profesionalisasi secara terus menerus. Pada fase awal, idealnya institusi lah yang mengambil peran utama. Alasan esensial lain di perlukannya pembinaan dan pengembangan guru ialah karakteristik tugas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan ipteks. Untuk memenuhi kriteria profesional, guru harus menjalani profesionalisasi menuju

⁵² Ibid, hal. 177

derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus. Dalam UU Nomor 74 Tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1/ D-4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi minimum dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau D-4 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan atau /program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi.⁵³

c. Prinsip Pengembangan Profesional

Pengembangan profesional guru bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi ketentuan formal dalam organisasi, namun harus dapat menjadi bagian utama dalam meningkatkan kapasitas sekolah dalam melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan. Untuk itu keefektifan pengembangan profesional perlu terus dievaluasi dan dikembangkan secara kontinu, karena jika pengembangan profesional guru dilakukan secara efektif, maka efek pada terlaksananya proses pembelajaran akan signifikan, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Agar pelaksanaan pengembangan profesional efektif.⁵⁴

Pengembangan profesional guru tentu saja harus fokus pada guru sebagai pelaksana pembelajaran, namun juga perlu orang-orang lain memahami apa yang harus dilakukan untuk memberi dukungan pada guru dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya. Dalam pelaksanaannya

⁵³ Danim Sudarwan, *Pengembangan Profesi Guru dari PRA. Jabatan, Induksi, Ke Profesional Madani*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011), hal. 84-85

⁵⁴ Ibid, hal. 178

meskipun guru yang akan mendapat manfaat utama, namun secara bersamaan juga perlu diperhatikan, karena kolegialitas akan membuat peningkatan kompetensi makin merata yang berarti kemampuan organisasi juga akan meningkat. Pengembangan profesional guru harus meningkatkan intelektualitas guru dan kapasitas kepemimpinannya, demikian juga kapasitas kepala sekolah dan yang lainnya yang terlibat dalam organisasi sekolah.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai pengembangan profesional guru tentu saja pada guru tersebut, dimana gurulah yang menjadi fokus utama guru lah yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembelajaran, guru juga dituntut untuk profesional dan meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan tugas (amanah) tanggung jawab, jika guru telah memiliki kompetensi yang baik yang bermutu maka pendidikan ikut bernilai baik.

Pengembangan profesional guru, juga harus mendorong pada pengembangan keahlian guru dalam penguasaan materi pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya, makin ahli dalam penggunaan strategi pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran berstandar tinggi efektif dan bermutu).

C. Kompetensi Profesional Guru

1. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan atau kecakapan. Menurut kamus besar bahasa indonesia kompetensi dapat diartikan sebagai (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau

memutuskan sesuatu hal. Istilah kompetensi banyak makna atau arti sebagaimana di kemukakan oleh para ahli.⁵⁵

Johnson menyatakan: “*competency as rational performace which satisfactrilu meets the objective for a desire condition*” Menurutny, kompetensi merupakan prilaku rasional guna mencapai tujuan yang di isyaratkan sesuai dengan kondisi yang di harapkan dengan demikian, suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat di pertanggung jawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan⁵⁶.

Sementara itu, Muhaimin menjelaskan bahwa kompetenssi adalah “seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk di anggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu. Komepentsi memiliki aspek-aspek tertentu, gordon merinci beberapa aspek atau rana yang ada di dalam konsep kopetensiyaitu :

- 1). Pengetahuan (*knowladge*);
- 2). Pemahaman (*understanding*);
- 3).Kemampuan (*skill*);
- 4).Nilai (*value*);
- 5).Sikap (*interesting*);
- 6).Minat (*interest*), enam aspek dari kompetensi yang telah di uraikan di atas adala gambaran bagaimana kompretensi itu merupakan hal yang menentukan dan mendukung profesi yang di miliki, termasuk profesi guru⁵⁷.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi guru adalah karakteristik dasar seseorang

⁵⁵ Syafaruddin Nurdin dkk, *guru profesional dan implementasi kurikulum*, (Jakarta: ciputat Pers, 2002), hal. 16

⁵⁶ Wina sanjaya, *Pembelajaran berorintasi standar proses pendidik*, (Jakarta: kencanaaperdana media, 2011), hal. 17

⁵⁷ John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hal.449

yang berkaitan dengan kinerja berkereteria efektif dan unggul atau kecakapan dalam suatu pekerjaan dan situasi tertentu.

Istilah profesionalisme berasal dari *Profession* dalam Kamus Inggris Indonesia kata *Profession* mengandung arti sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.⁵⁸Maksud nya adalah seseorang guru tidak bisa di lakukan oleh sembarang orang harus benar-benar memiliki ke ahlian dalam bidang pendidikan.Artinya adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang di sebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, tetapi memerlukan persiapan melalui pendidikan dan pelatihan secara khusus.Selain beberapa kriteria di atas untuk menjadi seorang guru yang profesional, teliti dalam bekerja merupakan salah satu ciri profesionalitas.Demikian juga Al-Qu'an menuntut kita agar bekerja dengan penuh kesungguhan, apik dan bukan asal jadi.Dalam QS. Al-An'am surah ke 6 ayat 135 yang berbunyi:

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ

عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Sesungguhnya,

⁵⁸ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal.105

orang-orang yang lalim itu tidak akan mendapat keberuntungan.(Q.S. AL-An'am: 135)

Menurut *Rice* dan *Bhisoprick* dan *Glickman* guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru oleh edua pasangan penulis tersebut di pandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidak tahuan (*ignorance*) menjadi tahu, dari ketidak matangan (*immaturity*) menjadi matang, dari arahan oleh orang lain (*other-directendess*) menjadi mengarahkan diri sendiri.⁵⁹ Sedangkan Glicman menegaskan bahwa seseorang bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) dan motivasi (*Motivation*)⁶⁰.

Menurut *Djam'an satorin* profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seseorang profesional. Kedua penampilan seseorang alam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Dalam pengertian kedua ini, istilah profesional di kontraskan dengan non "profesional" atau "amatiran" dalam kegiatan sehari-hari seseorang melakukan pekerjaan profesional sesuai dengan bidang ilmu yang telah dimilikinya, jadi tidak asal-asalan⁶¹.

Adapun pengertian profesional menurut *Uzer Usman* adalah "suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa biang ilmu yang

⁵⁹ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru sekolah dasar*, (Jakarta: bumi aksara, 2005), hal. 5

⁶⁰ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: PT. bumi aksara, 2008), hal. 66

⁶¹ Jamil Suprihatiningrum, *gutu profesional*, (Depok: Ar Ruuz-Media, 2010), hal.50

secara sengaja harus di pelajari dan kemudian di aplikasikan bagi kepentingan umum⁶².

Pengertian yang lebih lengkap dan spesifik tentang guru dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada ketentuan umum pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa guru adalah “pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah”.⁶³

Dengan demikian tugas utama guru dalam melaksanakan profesinya terdiri dari mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan. Secara sederhana guru profesional adalah guru yang mampu mengendalikan fungsi otak dan hatinya untuk sesuatu yang bermanfaat dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang telah di amanahkan.

Manusia diperintahkan bekerja, berkarya atau beraktifitas menurut keadaannya masing-masing oleh sebagian ulama di maknai secara profesional. Artinya setiap orang harus bekerja menurut *syakillatih (Skill)* , bidang profesi yang menjadi keahliannya. Bukankah itu artinya kita harus

⁶² Rusman, *model-model pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2012), hal.18

⁶³ Kusnandar, *Guru Profesional implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007), hal. 45

bekerja secara profesional tidak boleh asal jadi atau asal asalan saja / seenaknya saja.⁶⁴

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Yaitu kemampuan dari seorang guru atau tenaga pendidik dalam mengelola, penguasaan terhadap materi pelajaran dan kemampuan guru dalam pengelolaan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, penguasaan materi, metode dan media pembelajaran serta penilaian prestasi belajar. Penguasaan guru terhadap materi pembelajaran sangat penting guna menunjang keberhasilan pengajaran.⁶⁵

2. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Dari beberapa sumber yang membahas tentang kompetensi guru secara umum dapat diidentifikasi tentang ruang lingkup kompetensi profesional guru sebagai berikut :

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik sosial, psikologis, sosiologis dan sebagainya.
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik.
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang study yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Mengerti, dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

⁶⁴ Hamkah Abdul Aziz, *Karakter guru profesional*, (Jakarta: AL Mawardi Prima, 2016), hal. 90

⁶⁵ Ibid, hal 18

- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat media dan sumber belajar yang relevan
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik .⁶⁶
- 8) Mampu menumbuhkan kepedulian peserta didik.

Sedangkan secara lebih kusus, kompetensi profesional guru dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Memahami Standar Nasional Pendidikan yaitu meliputi

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar kompetensi Lulusan
- 4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- 5) Standar sarana dan prasarana
- 6) Standar pengelolaan
- 7) Standar pembiayaan
- 8) Standar penilaia pendidikan.⁶⁷

b. Mengembang kurikulum Tingkat

- 1) Memahai Standar Kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
- 2) Mengembangkan Silabus
- 3) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
- 4) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik

⁶⁶ Moh Ozer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hal. 137

⁶⁷ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 136

- 5) Menilai hasil belajar
- 6) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan zaman.⁶⁸

Dari paparan diatas dapat penulis tarik kesimpulan yaitu mengenai guru harus memiliki sikap profesional yaitu Guru dituntut untuk dapat mampu dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan harus dapat memahami standar nasional, mengembang kurikulum tingkat , menguasai materi standar, guru harus profesional ddalam mengelola program pembelajaran, mengelola kelas.

c. Menguasai Materi Standar

- 1) Menguasai bahan pembe;ajaran di bidang studinya
- 2) Menguasai bahan pendalaman

d. Mengelola Program Pembelajaran

- 1) Merumuskan tujuan
- 2) Menjabarkan kompetensi dasar
- 3) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran
- 4) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
- 5) Melaksanakan pemebelajaran.⁶⁹

e. Mengelola kelas yang meliputi

- 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran
- 2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif.⁷⁰

3. Kemampuan Profesional Guru

⁶⁸ Oemar Hamalik, *Pendidikan guru: berdasarkan pendekatan kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 29

⁶⁹ Ibid, hal. 138

⁷⁰ H.U. Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2015), hal.28

Kemampuan profesional guru menurut Uzer Usman meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menguasai landasan pendidikan
2. Menguasai bahan pengajaran
3. Menyusun Program pengajaran
4. Melaksanakan Program Pengajaran
5. Menilai hasil belajar dan mengajar yang telah dilaksanakan

Sesuai pernyataan di atas, maka seorang guru yang profesional adalah guru yang mampu atau menguasai dan mempunyai strategi mengajar, meliputi menguasai bahan yang akan di ajarkan, mampu menyusun program maupun membuat penilaian hasil belajar yang tepat. Selain itu, guru juga harus mampu memiliki kemampuan dalam membangkitkan motivasi bagi belajar siswa. Mengenai hal ini menurut Ibrahim dan Syaidih ada beberapa kemampuan yang mesti dimiliki oleh guru yaitu :

Pertama, guru menggunakan metode dan media mengajar yang bervariasi. Dengan metode dan media yang harus bervariasi agar siswa tidak mudah bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kedua, memilih bahan yang menarik minat dan dibutuhkan siswa. Sesuatu yang dibutuhkan akan menarik perhatian, dengan demikian akan membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Ketiga, memberikan saran antara lain ujian semester, ujian tengah semester, ulangan harian dan juga kuis. Keempat, mengadakan

persaingan sehat melalui hasil belajar siswa. Dalam persaingan ini dapat diberikan pujian, dan hadiah.⁷¹

Menurut *Harefa* ada sebelas indikator sehingga seseorang dikatakan sebagai profesional yaitu :

1. Bangga pada pekerjaan, dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas.
2. Berusaha meraih Tanggung jawab
3. Mengantisipasi, dan tidak menunggu perintah, mereka menunjukan inisiatif.
4. Mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampung tugas
5. Melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka.
6. Selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang-orang yang mereka layani.
7. Ingin belajar sebanyak mungkin.
8. Benar- benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang mereka layani
9. Belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani sehingga bsa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada di tempat.
10. Bisa dipercaya memegang rahasia.
11. Jujur bisa dipercaya dan setia

Dari paparan diatas penulis dapat menarik kesimpulan yaitu dari paparan diatas Menurut *Harefa* ada sebelas indikator sehingga seseorang dikatakan sebagai profesional, jadi sebagai tenaga pendidik yang profesional

⁷¹ R. Ibrahim Syaidih, *Pengembangan Profesionalitas Guu* (Bandung: PT Rosdakarya, 1986), hal. 28

guru akan melakukan pekerjaan secara otonom, mengabdikan diri untuk masyarakat, dan harus memiliki rasa tanggung jawab, dan harus mampu dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Seagala macam bentuk kemampuan yang ada pada guru profesional, maka harus dikembangkan terus menerus secara maksimal. Seorang guru jangan langsung puas dengan kemampuan yang ada pada dirinya yang dimiliki sekarang. Karena pada dasarnya, guru adalah seorang yang dinilai mampu atau paham hal tugas-tugas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya (pekerjaan).

4. Ciri- ciri Profesional Guru

Hakekat pada dasarnya adalah hal yang membicarakan secara mendalam dan mendasar tentang sesuatu. Artinya apabila yang bersifat mendasar tadi tidak ada kesensian objek itu hilang. Demikian halnya dengan profesi maka hakekatnya adalah "*Informend responsiveness*" (sikap yang bijaksana) serta pelayanan/ pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, teknik atau prosedur yang mantap serta sikap kepribadian tertentu. Hal ini berarti bahwa seorang pekerja profesional selalu mengadakan pelayanan/pengabdian yang dilandasi kemampuan profesional serta falsafah yang mantab.

Dengan hakekat yang dimiliki maka seorang profesional menampakkan adanya keterampilan teknis yang didukung oleh sikap kepribadian tertentu karena dilandasi oleh pedoman-pedoman tingkah laku khusus (kode etik) yang mempersatukan pendidikan yang baik sebagaimana mereka dalam masyarakat modern dewasa ini dari sifatnya yang selalu menantang, adalah model pendidikan mengharuskan tenaga pendidikan dan guru yang berkualitas dan profesional. Karena masyarakat memerlukan

pemimpin yang visioner dan mampu memimpin lembaga pendidikan, sehingga produk dari pendidikan bermanfaat bagi masyarakat, didukung tenaga guru, konselor, dan supervisor yang profesional.⁷²

Segala sesuatu mempunyai atau memiliki ciri-ciri yang menjadi lambang atau identitas sehingga orang dapat atau mudah mengenali. Ciri adalah tanda yang spesifik dan khas yang melekat pada sesuatu yang membedakannya dari sesuatu yang lain. Begitu juga guru profesional, mempunyai ciri khas sehingga dia berbeda dengan guru yang tidak profesional atau guru yang amatir.⁷³

Berikut adalah ciri-ciri guru profesional :

a. *Enterpreunership*

Guru profesional mempunyai ciri enterpreunerhip maksudnya dia mempunyai kemandirian. Ia dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada apapun selain bergantung kepada Allah ini bukan di artikan bahwa guru bukan terikat dengan apapun. Tetapi maksudnya adalah guru tetap harus bertanggung jawab dengan mengikuti sistem yang berlaku di institut tempat ia mengabdikan. Kemandirian disini hanyalah pada sikap .sikap seorang guru memancarkan kepibadian, kewaiban kejujuran, dan potensi intelektualnya yang baik. Sehingga kemandirian dapat di maksnai sebagai integritas guru.⁷⁴

b. *Self Motivation*

⁷² Saiful sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Cv. Alfabeta, 2005), Hal.216

⁷³ Moh Uzer Usman Opcit, Hal. 138

⁷⁴ Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan profesi kependidikan*, (Jakarta: Perdana Media grub, 2011), hal. 27

Guru profesional mempunyai *self motivation* yang tinggi ia harus memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu dengan baik, serta agar bisa terus menerus berada dalam kondisi lebih baik dan lebih baik lagi. Motivasi itu datang tanpa harus adanya rangsangan (stimulasi) dari luar atau dari orang lain, karena guru yang profesional mampu mengadirkannya pada diri sendiri. Ini bisa terjadi karena guru yang profesional terbiasa menggunkan dan memaksimalan fungsi otak dan hatinya sehingga guru tidak pernah kesulitan untuk memotivasi dirinya untuk berbuat dan berkarya yang lebih baik dalam kehidupannya. Hebatnya motivasi dari guru selalu pahami begitu iya tidak akan kesulitan dalam memberikan motivasi bagi murid-muridnya. karena sesungguhnya guru adalah motivator bagi dirinya sendiri dan orang lain.⁷⁵

c. *Self Growth*

Setiap orang Pasti menginginkan tumbuh dan berekmbangke arah yang lebih baik. Sudah pasti semua guru juga mnengapakan dirinya dapat berkembang searah dengan kemampuan zaman, agar merka tidak tergilas oleh laju perkembangan yang demikian cepat. Karena kehidupan kita senantiasa berisi perubahan maka mau tidak mau guru harus ikut dalam arus perubahan itu. Guru profesional selalu berupaya mengikuti perubahan untuk mencapai kualitas diri maksimal. Dia ingin tumbuh dan berkembang bersama murid,

⁷⁵Sudarwan danim, *Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 23

sehingga ketika berdiri di depan kelas, di hadapan murid-muridnya ia tidak terkesa ketinggalan zaman.⁷⁶

d. *Capability*

Capability atau kapasitas adalah kemampuan, kecakupan atau keterampilan orang yang mempunyai semua potensi di atas dan dia menggunakan atau memanfaatkan secara maksimal. Dalam hal guru profesional berarti guru berkarya “Membentuk” murid-muridnya dengan segenap kecakapan berdasarkan sumber-sumber yang benar.

Sedangkan menurut *Gary A Davis* dan *Margae A tomas Trianto*, ciri-ciri Guru yang efektif antara lain

1. bersikap adil dan tidak pilih kasih kepada siswa
2. berempati dan berbaik hati kepada komunitas sekolah masyarakat.
3. bertanggungjawab dan suka menolong individu yang lain.
4. Tenang dan memiliki emosi yang stabil
5. Berbahasa lugas dan bertingkah laku beradab
6. memiliki kesabaran ketika membimbing siswa termasuk yang nakal.
7. Bersikap terbuka jujur, dan ikhlas kepada siswanya dan sesama sejawat.⁷⁷

5. Syarat-syarat Guru Profesional

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional meliputi :

⁷⁶ Hamka Abdul Aziz, *karakter guru profesional*, (Jakarta: Al-mawardi, 2016), hal.93

⁷⁷ Moh. Ozer Usman Opcit, hal. 135

- a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir a), artinya guru harus mampu mengelola kegiatan pembelajaran, mulai dari merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Guru harus menguasai manajemen kurikulum, mulai dari merencanakan perangkat kurikulum, melaksanakan kurikulum dan serta memiliki pemahaman tentang psikologi pendidikan, terutama terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan berhasil.⁷⁸
- b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (SNP, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Artinya guru memiliki sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi siswa. Dengan kata lain guru harus memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan tiga pusat yang dikemukakan oleh Kihajar Dwantara, yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. (di depan memberikan telan/contoh, di tengah memberikan rasa, dan di belakang memberikan dorongan/ motivasi)

⁷⁸ Rusman, *Model-model pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2012), hal.23

- c. Kompetensi Profesional, adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang diterapkan dalam standar Nasional Pendidikan (SPN, penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir c). Artinya guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang study atau *subjek mater* yang akan di ajarkan serta penguasaan dedaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritis, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum, dan landasan kependidikan.⁷⁹
- d. Kompetensi sosial, adalah kemampuan guru sebagai bagaian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik. Dan masyarakat sekitar. (Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir d). Artinya ia menunjukan kemampuan berkomunikasi sosial, baik dengan murid-muridnya maupun dengan sesama teman guru, dengan kepala sekolah bahkan dengan masyarakat luas.⁸⁰

Dari paparan / penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan sudah di jelaskan syarat-syarat guru profesional ada 4 yang meliputi, 1.Kompetensi pedagogik, 2.Kompetensi kepribadian, 3.Kompetensi profesional, dan yang terakhir ini adalah kompetensi sosial. Dari ke 4 syarat-syarat diatas maka sejatinya untuk menajadi guru yang baik adan guru yang profesional untuk semua sudah di cakup di bagian kompetensi profesional .

6. Kewajiban Guru Praofesional

⁷⁹ Ibid, Hal.23

⁸⁰ H.U. Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal. 13

Sebagai guru profesional dala melakukan tugas keprofesionalan, menurut UU No. 14. Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 20 , seperti yang di sampaikan Djaali dalam Nasional Forum Komunikasi Pasca Sarjana LPTKN diManado 14 Mei 2011⁸¹, maka guru di tuntuk untuk memiliki kewajiban yaitu :

- a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluai hasil pembelajaran
- b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejakan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan ondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika
- e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut diatas, maka seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka adalah sebagai soso yang senantiasa dapat ditiri dan di gugu.

⁸¹ Amini, *Profesi Keguruan*, (Medan: Perdana Publishing , 2016), Hal. 17

D. Kajian Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut :

1. Hana Cahya Mustaqim, 2017, Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SD Negeri 1 Jati Karanganyar . Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Jati Karanganyar. (2) Mendeskripsikan kendala peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Jati Karanganyar. (3) Mendeskripsikan solusi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Jati Karanganyar. kualitatif fenomenologi yaitu Narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Hasil penelitian: (1) Peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru, yaitu: a. Sebagai *manager* memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikannya. b. Sebagai administrator memiliki hubungan yang erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah. c. Sebagai supervisor dapat mengetahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran d. Sebagai *leader* memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah. e. Sebagai innovator memiliki strategi mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. (2)

Kendala kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru, yaitu: a. Guru kurang menguasai media TIK sebagai bagian dari pengembangan profesional. b. Sebagian besar guru kurang kreatif dalam mengembangkan RPP. (3) Solusi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru, yaitu: a. Kepala sekolah mendorong guru untuk mengikuti kursus *computer* dan membuat kelompok kerja guru tentang teknologi informasi dan komunikasi. b. Kepala sekolah memberikan pelatihan menyusun RPP dan memberikan contoh RPP yang bagus sesuai kemampuan guru.

2. Dewi Susanti, Moh. Rois, Fartika Ifriqia, 2017, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Guru di SMA Utama Insan, Cingkareng. Maju mundurnya suatu lembaga pendidikan sangat berpengaruh pada sosok pemimpin. Dalam lembaga pendidikan kepala sekolah mempunyai peran penting untuk memajukan sekolah yang di pimpinnya. Pada dasarnya pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang saling berpengaruh dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian menurut Moleong (2002, 4) yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam peneliti ini adalah studi kasus. Seperti yang dijelaskan Azwar (2001, 8), bahwa “studi kasus merupakan penyelidikan yang mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut”. Dari komponen tersebut, gurulah yang

memegang peran penting dan merupakan kunci pokok bagi keberhasilan pendidikan. Untuk itu kompetensi seorang guru harus di tingkatkan. Dengan adanya komponen kepala sekolah dan guru yang sangat berperan penting untuk kemajuan pendidikan, maka penulis tertarik untuk mendalami tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru, dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru?, 3) Apa faktor penghambat usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru? Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa 1) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. 2) Faktor yang mendukung usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. 3) Faktor penghambat usaha kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru.

3. Elvi Suharni, 2016, Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Dan Kompetensi Kepribadian Guru Pada Sdn 6 Bukit Tunggul Palangka Raya. Kebijakan seorang pemimpin pada lembaga-lembaga pendidikan seringkali menjadi titik perhatian para ahli, baik dibidang ilmu pengetahuan itu sendiri maupun bidang disiplin ilmu lainnya. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama keberadaan sebuah lembaga pendidikan. Untuk itu perlu mengkaji kembali kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah dalam peningkatan kompetensi Pedagogik dan kompetensi kepribadian guru sehingga dapat mengembangkan kemampuan guru lebih profesional dalam bidangnya. Sesuai dengan masalah yang diangkat, maka rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan bagaimana kebijakan

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di SDN 6 Bukit Tunggul Palangka Raya, mendeskripsikan bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan kebijakan kepemimpinan tersebut terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di SDN 6 Bukit Tunggul Palangka Raya, mendeskripsikan hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di SDN 6 Bukit Tunggul Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di SDN 6 Bukit Tunggul Palangka Raya. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pengamatan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Adapun dalam penelitian ini teknik memeriksa keabsahan data digunakan yaitu teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Kebijakan yang dibuat kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di SDN 6 Bukit Tunggul Palangka Raya adalah dengan cara mengikutkan guru-guru KKG, workshop, pelatihan-pelatihan, Guru-guru SDN 6 Bukit Tunggul lebih aktif dan disiplin dalam melaksanakan tugas masing-masing karna menyadari bahwa itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai guru, dan juga hubungan antara guru yang satu dengan guru yang lainnya sangat harmonis penuh kekeluargaan. (2) Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru di SDN 6 Bukit Tunggul

Palangka Raya yaitu melalui model pendekatan rasional (*top down*) dan model pendekatan *bootom up*. (3) Kendala kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian guru di SDN 6 Bukit Tunggal Palangka Raya adalah banyaknya tugas-tugas yang menyita waktu, dan juga waktu kegiatan peningkatan kompetensi guru bersamaan dengan kegiatan proses belajar mengajar sehingga guru tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan rutin.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari sampai 20 April 2019 Adapun lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, Jl.Suluh No.80 A, Sidoarjo Hilir Medan Tembung.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang menggunakan teknik pengumpulan data dari informan penelitian dalam setting-setting alamiah. Penelitian menafsirkan fenomena dalam pengertian yang dipahami informan. Para penelitian kualitatif membangun gambaran yang kompleks dan holistik tentang masalah yang diteliti peneliti dengan deskripsi yang detail dari persepektif informan.⁸²

Alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah metode kualitatif ini digunakan lebih muda mengadakan penyesuaian, lebih muda menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian dan memiliki kepekaan penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dicapai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa

⁸² Masganti, *Metode Penelitian pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PRESS, 2012), hal.158

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun secara umum teknik pengumpulan data terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan, merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dapat dilakukan secara langsung dengan mata tanpa alat bantu, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan yang canggih. Observasi merupakan proses aktivitas yang dipengaruhi oleh ekspresi pribadi, pengalaman, pengetahuan, perasaan, nilai-nilai, harapan dan tujuan observer.⁸³

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸⁴

c. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Untuk mengambil hasil dokumen peneliti mengambil beberapa foto sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan sebuah penelitian di sekolah tersebut. Selain itu dokumentasi dilakukan peneliti untuk menguatkan data-data hasil

⁸³ Jemmy Rumengan, (2010), Metodologi penelitian dengan SPSS, Batam: UNIBA PRESS hal:51

⁸⁴ Masganti, (2012), Metode Penelitian pendidikan Islam, hal:188

penelitian. Dalam melakukan studi dokumentasi ini, peneliti ikut langsung dalam kegiatan yang ada di sekolah tersebut.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diteliti yaitu kepala sekolah. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi subjek diantaranya adalah kepala sekolah.

Informan adalah orang yang ada dalam latar penelitian atau orang di manfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi tempat penelitian).⁸⁵

Untuk menjaring informasi yang cepat dan lebih akurat, para informan ialah mereka yang sesuai dengan fokus penelitian ini. Kegunaan informasi bagi peneliti ialah dalam rangka membantu agar secepatnya dan seteliti mungkin peneliti dalam membenamkan diri dalam konteks setempat. Karena itu peneliti telah menetapkan para informasi yang diharapkan dapat mengatarkan peneliti kepada kelengkapan dan kekurangan informasi yang diperoleh. Dengan adanya penetapan awal para informan ini walaupun tidak menutup kemungkinan akan bertambah ataupun berkurang, peneliti berusaha memetakan data apa saja yang akan didapatkan dari masing-masing informan tersebut. Diantara informan tersebut adalah:

a. Guru

Melalui gurumaka peneliti akan mendapatkan mengenai pembuatan kebijakan apa saja yang dibuat oleh kepala sekolah agar dapat memberikan nilai baik serta untuk mengembangkan kompetensi profesional guru.

⁸⁵ Andi Prastowo, (2014), Metode Penelitian Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hal:195

b. Tata Usaha

Melalui Tata Usaha peneliti ingin mengetahui mengenai dokumen-dokumen tentang pembuatan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah untuk sekolah, serta untuk mengetahui apa saja rencana kepala sekolah dalam pembuatan kebijakan untuk sekolah dan serta peneliti ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru

E. Teknik Analisis Data

Setelah data diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik pengumpulan data atau instrumen yang ditetapkan, maka kegiatan selanjutnya adalah analisis data.

Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data ialah proses mencari mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak lain. Lebih jauh dijelaskan bahwa analisis data mencakup kegiatan mencakup kegiatan mengerjakan data, menatanya membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola mensitesisnya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang akan dipelajari dan memutuskan apa yang akan dilaporkan.

Maka untuk mengelola dan menganalisa data dalam penelitian ini digunakan prosedur penelitian kualitatif. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan

proses, analisis ini berlangsung secara sekuler selama penelitian ini berlangsung.

Penjelasan ketiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “ kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Jadi reduksi data adalah lebih memfokuskan, menyederhanaan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data dirancang untuk menggabung informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan

Salah satu data disajikan peneliti menganalisis kembali data tersebut dan dibandingkan dengan teori yang mendasarinya kemudian diuraikan setelah melakukan analisis data dikaitkan dengan teori, kemudian peneliti menarik kesimpulan.⁸⁶

F. Tehnik Penjamin Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data juga sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapatkan pengakuan

⁸⁶Salim dan syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hal. 144-150

atau terpercaya. Untuk memperoleh pengakuan terhadap hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan.

Uji penelitian kualitatif dan teknik keabsahan data adalah sebagai berikut: pengujian kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas(keterlibatan), dependabilitas (kebergantungan), dan konfirmabilitas (kepastian) yang terkait dengan proses pengumpulan dan analisis data.

1. Kredibilitas (kepercayaan)

Ada beberapa usaha untuk membuat data lebih terpercaya (*credible*) yaitu: dengan keterkaitan yang lama, ketentuan pengamatan, melakukan trigulasi, mendiskusikan dengan teman sejawat, kecukupan referensi dan analisis kasus negatif.⁸⁷

2. Transferability

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberikan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

⁸⁷ Ibid, hal.165

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

4. Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga penelitiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikatkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.⁸⁸

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2014, hal. 226- 277

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Singkat SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai februari 2019. Penelitian ini dilakukan di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan Jl. Suluh No 80 A Sidorejo Hilir, Medan Tembung.

SMP dan SMA Swasta Perguruan utama medan, berdiri pada bulan Agustus Tahun 1982. Sebagai hasil usaha pribtis dari yayasan perguruan utama medan yang didirikan oleh Hj.Alid selaku pemilikik yaysan perguruan utama medan dan adapun letak yayasan perguruan utama medan ini terletak di jalan suluh no 80 A sidoarjo hilir, kecamatan Medan tembung, kota medan.

Awal berdiri jumlah siswa masuk sebanyak 8 kelas dengan kondisi sekolah awalnya permanen yang terdiri dari lima ruang yaitu terdiri atas, ruang kelas, kantor kepala sekolah, kantor guru adapun kantor tata usaha dengan kantor keppala sekolah teletak jadi satu ruangan yang di sekat. Kemudian tahun 2012 ada perbaikan gedung yang semuala semi permanen menjadi permanen dan hingga sekarang terus melakukan pembangunan perbaikan saana dan prasarana sekolah.

Di sekolah Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu sekolah yang terdiri dari sekolah SMP dan SMA, sekolah yayasan perguruan utama medan memiliki 1 laboratorium ipa, 1 perpustakaan, 1 laboratorium komputer, 1 ruang guru, 1 ruang BK, 1 kamar mandi . dalam rangka usaha meningkatkan

mutu pendidikan SMP dan SMA perguruan utama medan ini, menggunakan pendidikan manajemenpeningkatan mutu berbasis sekolah (MBS) dimana pendidikan ini melibatkan seluru anggota stakeholder (orangtua, siswa, alumni).

2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Adapun Visi dan Misi SMA Yayasan Perguruan Utama Medan ialah

a. Visi :

Mampu menguasai IPTEK (Logika), Mengutamakan moral (Etika), mencintai dan menghargai keindahan (Estetika) dan memperkaya Praktika serta menumbuhkan Upaya dan Sikap Kompetitif untuk meraih prestasi.

b. Misi :

1. Menumbuhkan moral dan budi pekerti sehingga mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela.
2. Meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi pelajaran, rasa bangga pada almamater serta penampilan prima setiap komponen.
3. Membangkitkan sikap ingin maju dan bersaing dalam diri siswa dengan mengoptimalkan daya nalar sebagai upaya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi.
4. Mempertahankan sikap saling menghormati, harga-menghargai (Etika) antar setiap unsur agar tercapai keharmonisan kerja.
5. Menampilkan semangat dan daya kerja / belajar yang tinggi (Etos Kerja) sebagai perwujudan kesejajaran Pengetahuan yang dimiliki

dengan keterampilan kerja / belajar untuk memupuk pengalaman yang akan dituangkan dalam kehidupan di tengah masyarakat.

3. Keadaan Siswa SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Keberadaan peserta didik sebagai sebuah faktor adanya sebuah sekolah. Sekolah tidak akan bisa melaksanakan proses pendidikan jika tidak ada yang ingin didik. Oleh karena itu, keberadaan peserta didik menjadi daya dukung bagi madrasah.

Keberadaan siswa di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan pada Tahun Pelajaran 2017/2018 berkisar sekitar 93 peserta didik. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

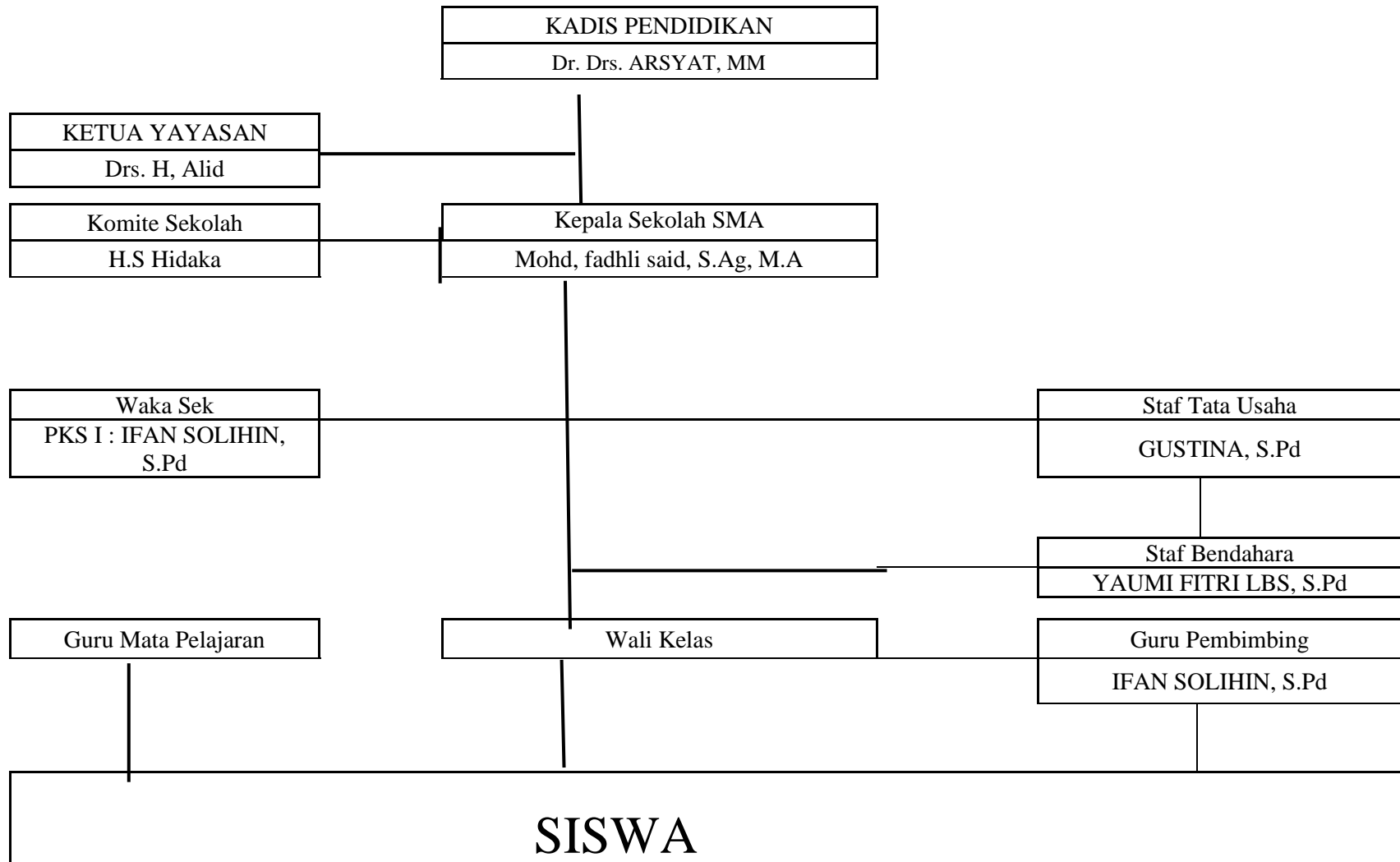
**Tabel 1. Data Peserta Didik SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Tahun Ajaran. 2017-2018**

Keadaan Kelas Siswa	Tahun Pelajaran 2017 / 2018			
	Jumlah Rombel	Lk	Pr	Jumlah
Kelas X IPA	1	10	10	20
Kelas X IPS	1	12	7	19
Kelas XI IPA	1	11	10	21
Kelas XI IPS	1	14	12	26

Kelas XII IPS	1	19	14	33
Jumlah	5	66	53	119

Dapat dilihat dari tabel 4 Data peserta didik SMA Yayasan Perguruan Utama Medan Pelajaran 2017/2018 memiliki 5 rombongan belajar. Lima rombel tersebut dalam lima kelas. Kelas X-IPA berjumlah 20orang dengan banyak laki-laki 10 orang dan perempuan 10 orang. Kelas X-IPS berjumlah 19orang, laki-lakinya berjumlah 12 orang dan perempuan berjumlah 7 orang. Dan kelas XI IPA berjumlah 21 orang, jumlah laki-lakinya 11orang dan jumlah perempuannya 10 orang.Dan Untuk kelas XII-IPS laki-lakinya berjumlah 19 dan perempuannya berjumlah 14 orang. Jadi, total keseluruhan jumlah peserta didik di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan adalah Sebanyak 93 orang.

4. Struktur Organisasi di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan



5. Keadaan Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Pendidik memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan. Pendidik memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik. Pendidik yang ada di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan berjumlah 14 orang. Berikut rincian data pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Yayasan Perguruan utama Medan

Tabel 2. Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

No	Nama Guru	L/P	Tempat/Tgl. Lahir	Kawin/ Tidak Kawin/	Agama	Ijazah Tertinggi/ Jurusan	Jabatan		Mulai bertugas pada sekolah ini	Masa kerja		Mata Pelajaran yang diajarkan
							Jabatan	TMT		THN	BLN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Mohd, fadhli said, S.Ag, M.A	L	Tembung 16-04-1971	K	I	S1 / Pend.Agama Islam	Kasek	2013	10/01/2014	14	2	Agama Islam
2	IFAN SOLIHIN, S.Pd	L	SAENTIS 10/07/1989	K	I	S1/ Matematika	PKS-1 Guru	2014	16/07/2014	4	2	Matematika
3	BADRIAH, S.Pd	P	SIMPANG IV UPAH 18/10/2018	K	I	S1/ BK	BK	2018	02/12/2018		7	A. Islam
4	GUSTINA, S.Pd	P	Medan 08/10/1995	TK	I	S 1/FISIKA	TU	2018	18/01/2018		9	Matematika

5	Tiur Maria Sinaga, STh.	P	Medan 20/12/1972	K	K	S1/Teologi	Guru	2005	18/7/2005	13	2	A. Kristen
6	Putri Mayang, R. S. H	P	Medan 25/10/1974	TK	I	S1/Ilmu Hukum	Guru	2006	15/7/2006	12	2	PPKn
7	Nurkartika, SPd.	P	Medan 02/09/1983	K	I	S1/Biologi	Guru	2006	15/7/2006	12	2	IPA
8	Sulwana Siregar	P	TANJUNG BALAI 1993-01-17	TK	I	S1/B.INGGRIS	Guru	2018	18/01/2018		9	B. INGGRIS
9	Khairani, S.Pd	P	Bandar Selamat 1963-11-02	K	I	S1/ IPS	Guru	2018	17/07/2018		2	IPS
10	Dra. Nirwana Malau	P	Medan 1960-07-21	K	I	S1/TIK	Guru	2014	16/07/2014	4	2	TIK Prakarya
11	Ria Agustini, S.Pd	P	BANDAR KHALIPAH 1994-08-27	TK	I	S1/MATEMATIKA	Guru	2017	18/07/2017	1	2	MATEMATIKA
12	Santiana Dalimunthe, S.Pd	P	MEDAN 1987-04-27	K	I	S1/B. INDONESIA	Guru	2013	18/07/2013	5	2	B. INDONESIA
13	Chairul Azmi, S.Pd	L	Cinta Rakyat 1990-02-10	K	I	S1/PJOK	Guru	2016	16/07/2016	2	2	PJOK
14	Julaida, S.Ag	L	Mns blang matang 1968-12-31	K	I	S1/B.INGGRIS	Guru	2018	10/05/2018		1	B. INGGRIS

6. Sarana dan Prasarana yang ada di SMA Yayasan Perguruan Utama

Medan

Tabel 3. Sarana dan Prasarana di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

No	Keterangan Gedung	Jumlah	Keadaan / Kondisi				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Luas m ²	Ket
1	Ruang Kelas	3	3	-	-	-	-
2	Ruang Kepala Sekolah	1	-	-	-	-	-
3	Ruang Guru	1	✓	-	-	-	-
4	Ruang Kamar Mandi Siswa Putra	1	✓	-	-	-	-
5	Ruang Kamar Mandi Siswa Putri	1	✓	-	-	-	-
6	Halaman/ Lapangan Olah Raga	2	✓	-	-	-	-

Berdasarkan data dari Tabel 4.1 data sarana dan prasarana SMA Yayasan Perguruan Utama Medan bahwa terlihat sekolah dalam kondisi baik.

Tabel 4. Rekap Keseluruhan Sarana Ruang Kelas di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Kode Barang :

No.	Nama/Jenis Barang	Kode Barang
1.	Kursi Peserta Didik	KPD
2.	Meja Peserta Didik	MPD
3.	Kursi Guru	KG
4.	Meja Guru	MG
5.	Papan Tulis	PT

6.	TempatSampah	TS
7.	Jam Dinding	JD
8.	SoketListrik	SL
10.	Soket Sambung (Kiri dan Kanan)	SS
11.	Televisi	TV
12.	Lampu	LP
13.	Saklar Lampu	SLP
14.	Kipas Sirkulasi	KS
15.	Pintu	PU

Tabel diatas adalah merupakan kode barang sarana ruang kelas di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.

Tabel 5. Jumlah Barang Keseluruhan :

No.	Tingkatan	KPD	MPD	KG	MG	PT	TS	JD	SL	SS	LP	SLP	KS	PU
1.	Kelas X	397	-	1	1	1	21	17	80	28	72	31	18	18
2.	Kelas XI	227	101	9	11	9	9	6	30	22	36	16	7	9
3.	Kelas XII	392	173	16	16	16	15	8	35	32	62	24	16	16
Jumlah		1.016	274	42	44	43	45	31	145	82	170	71	41	43

Catatan :

Berikut ini arti dari kode barang di atas :**KPD** adalah Kursi Peserta Didik, **MPD** adalah Meja Peserta Didik, **KG** adalah Kursi Guru, **PT** adalah Papan Tulis, **TS** adalah Tempat Sampah, **JD** adalah Jam dinding, **SL** adalah Soket Listrik, **SS** adalah soket sambung, **TV** adalah Televisi, **LP** adalah Lampu, **SLP** adalah Saklar Lampu, **KS** adalah Kipas Silkurasi, **Pu** adalah Pintu.

Tabel 6. Total jenis barang keseluruhan :

No.	Nama/Jenis Barang	Jumlah
1.	Kursi Peserta Didik	1.016
2.	Meja Peserta Didik	274
3.	Kursi Guru	42
4.	Meja Guru	44
5.	PapanTulis	10
6.	TempatSampah	8
7.	Jam Dinding	31
8.	SoketListrik	145
12.	Lampu	20
13.	Saklar Lam	71
14.	Kipas Sirkulasi	41
15.	Pintu	43

Tabel diatas adalah merupakan Total dari jumlah keseluruhan Namadan Jenis barang yang ada di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru

Pada prinsipnya kebijakan pendidikan berkaitan dengan pengadaan gedung dan fasilitas, penyediaan tanah, pendayagunaan institusi, pengelolaan ketenagaan, keuangan atau anggaran, kurikulum, buku pelajaran, pemeliharaan, perbaikan, dan kebutuhan pembelajaran.⁸⁹

Kepala sekolah mengatakan hal yang sama terkait dengan pernyataan diatas, bahwa

“ Dalam membuat suatu kebijakan tidak sembarangan banyak yang harus dipertimbangkan, dan biasanya kebijakan yang dibuat itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, harus memikirkan anggaran juga, jadi tidak sembarangan. seperti kebijakan untuk kurikulum, kebijakan dalam memilih buku pembelajaran, dan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran, kayak misalnya kami memakai kurikulum 2013 untuk kelas X dan untuk kelas XII kami itu masih memakai KTSP, lalu buku yang kami gunakan dari penerbit erlangga ada yudistra ada tidak dari satu penerbit saja, buku-buku yang dianggap baik oleh guru yang itulah buku yang kami pakai, lalu kebutuhan pembelajaran itu harus dipenuhi misalnya sarana dan prasarana, materi ajar guru, silabus, RPP, itu lah yang harus dibawa oleh guru.”

⁹⁰

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan wakil kepala sekolah, yang menyatakan bahwa

“ Kebijakan yang dibuat kepala sekolah ya terkait dengan kebijakan kurikulum lalu kebijakan dalam membuat peraturan-peraturan sekolah, tentang kedisiplinan, tentang kehadiran siswa, kehadiran guru, hukuman buat siswa apa, hukuman buat guru apa jika melanggar, lalu guru mengajar harus bagaimana, itulah kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala sekolah di sekolah ini.”⁹¹

⁸⁹Syaiful sagala, *Administrasi pendidikan kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal. 94

⁹⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Utama Medan, Tanggal 07 Februari 2019. Pukul, 10:20 WIB

⁹¹ Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Utama Medan, Tanggal 11 Februari 2019. Pukul, 10:20 WIB

Dari hal tersebut dapat disimpulkan kebijakan yang dibuat di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan terkait dengan kebijakan pendidikan mengenai kurikulum, pengadaan buku pembelajaran dan kegiatan pembelajaran.

Dalam proses pembuatan kebijakan tahap yang harus dilalui kepala sekolah yaitu dengan penyusunan agenda⁹². Dalam proses penyusunan agenda ini kepala sekolah harus menyusun agenda dengan memasukan dan memilih masalah-masalah mana yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.

Sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan menyatakan bahwa dalam proses pembuatan kebijakan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru adalah:

“Yaaa,, selain kita selalu mengadakan musyawarah dengan guru-guru mata pelajaran, kemudian kita juga mengundang seseorang yang kita anggap yang memiliki kemampuan yaa seperti pelatihan / diklat yaa, diklat. Gabungan antar sekolah yang ada dalam luar sekolah, kemudian kegiatan kegiatan yang sifatnya pelatihan itu juga kita lakukan dalam upaya untuk mengembangkan kompetensi profesional guru itu dan dengan cara memonitoring keaktifan melalui absensi dan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk guru dan diadakannya musyawarah, yaaa,, dalam dalam rapat juga kita bermusyawarah mengenai bagaimana cara untuk membuat dan menentukan keputusan yang telah dibuat, adapun musyawarah antara kepala sekolah dengan guru isi musyawarahnya diantaranya ialah mengenai masalah bagaimana mengembangkan kompetensi ini. Jadi rapat itu bisa saja dilakukan diawal semester ditengah semester atau diujung smester mengenai tentang profesional guru dan mengenai penetapan siswa naik kelas”⁹³

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah seorang guru yang mengatakan bahwa

⁹² Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2008), hal.81

⁹³ Wawancara dengan Kepala Sekolah Yayasan Perguruan Utama Medan, Tanggal 07 Februari 2019. Pukul, 10:20 WIB

“Kita musyawarah, ada rapat dulu jadi kadang ada 6 bulan dalam satu semester itu 2 kali, kadang 2 semester itu 4 kali jadi, didalam rapat itulah semua kita bicarakan apa yang mau kita kembangkan.

Wakil kepala sekolah juga menyatakan hal yang sama terkait dengan pembuatan kebijakan bahwa

“Biasanya sebelum menentukan sesuatu kepala sekolah mengadakan musyawarah terkait dengan apa yang akan dilaksanakan, tidak langsung mengambil keputusan sendiri, biasanya pun kepala sekolah menanyakan keputusannya sebelum ditetapkan.”⁹⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai proses pembuatan kebijakan kepala sekolah melakukan penyusunan agenda melalui musyawarah tentang sesuatu hal mengenai kebijakan dalam mengembangkan kompetensi guru.

Dalam membuat kebijakan kepala sekolah juga harus mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru. Hal ini kepala sekolah mengungkapkan bahwa

“ Untuk membuat kebijakan pasti kita harus memikirkan banyak hal, misalnya seperti yang ditanya tadi, membuat kebijakan untuk mengembangkan kompetensi profesional guru, pasti kita pikirkan ke mana supaya guru tersebut menjadai guru profesional, guru tersebut harus kompeten misalnya dalam mengajar, guru yang kompeten pasti bisa membuat suasana belajar ini menjadi nyaman, guru kompeten harus bisa membuat anak-anak itu merasa senang apabila guru itu datang, jadi guru tersebut harus benar-benar bisa menguasai hal tersebut, guru harus bisa membuat media yang menyenangkan, makanya saya juga sudah menyiapkan sarana yang dapat mendukung, kayak infocus, laptop dan lain-lain.”

Hal ini senada dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang guru yang menyatakan bahwa

“ kepala sekolah juga memfasilitasi sih kayak kebutuhan-kebutuhan mengajar kayak laptop, infocus, buku panduan dan LKS juga ada, jadi guru kalau mau mengajar dengan media itu enak, ada medianya tidak

⁹⁴Ifan Solihin

bingung mau nyarik-nyarik adang, walaupun penggunaannya harus bergantian yang penting diberilah fasilitas seperti itu.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam menentukan kebijakan terkhususnya kebijakan untuk mengembangkan kompetensi profesional guru. Kepala sekolah mempertimbangkan hal-hal yang mendukung seperti fasilitas yang memadai.

Kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan profesional guru yaitu dengan cara mewajibkan guru-guru untuk mengikuti seminar-seminar terkait pendidikan dan juga pelatihan-pelatihan . Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan kepala sekolah di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan beliau mengatakan :

“Mengikuti seminar merupakan salah satu cara untuk menambah pengetahuan atau wawasan guru tentang pendidikan. Dengan mengikuti seminar-seminar, guru dapat mendapatkan ilmu baru.”⁹⁵

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Yaumi Fitri merupakan salah seorang guru yang menyatakan bahwa

“Jadi, dari Permasalahan diatas maka biasa kalau bapak itu dibuatnya ada pelatihan, yang kedua yaah disuruhlah gurunya belajar apa yang akan disampaikan dan diajarkan kepada siswa kita ini, kan guru inikan harus ada membuat RPP, jika tidak ada RPP bagaimana kita mau sampaikan kepada siswa, makanya guru guru ini wajib membuat RPP”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah melakukan musyawarah sebelum menentukan sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan sekolah. Kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu dengan

⁹⁵Mohd, fadhli said, S.Ag, M.A, Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, wawancara di ruang kepala sekolah, hari kamis, tanggal 10 Februari 2019 Pukul. 09:20 WIB

mengikuti sertakan guru-guru dalam seminar-seminar serta pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pendidikan.

2. Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru

Implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam pembuatan kebijakan terwujud dalam prakteknya/realisasi.⁹⁶

Wawancara dengan kepala sekolah terkait pengimplementasian kebijakan beliau memaparkan bahwa

“kebijakan yang dibuat untuk melihat apakah kebijakn itu berhasil apa tidak maka harus kita lihat penerapannya, atau bagaimana prakteknya dilapangan, memang semua kebijakan yang dibuat pasti ada yang menanggapinya dengan baik ada pula yang menanggapinya dengan tidak baik, apabila ditanggapi baik maka pengimplementasiaan atau prakteknya dilapangan pun baik tapi apabila tidak di respon dengan baik, maka hasilnya pun tidak baik. Terkadang bukan kebijakannya yang tidak baik namun pengimplementasiannya yang tidak baik.”

Sebagaimana yang dilakukan kepala sekolah terkait penerapan kebijakan tersebut beliau menyatakan bahwa

“Guru-guru wajib mengikuti seminar-seminar pendidikan biasanya dilaksanakan 2 bulan sekali, kadang ada juga yang dilakukan 3 bulan sekali. Biasanya seminar ini dilakukan di hotel, di balai dinas pendidikan tidak tentu sih dimana tempatnya, bisanya 3 bulan sekali pasti saya mengirim beberapa guru untuk menghadiri seminar tersebut, biasanya seperti seminar-seminar pendidikan karakter, pendidikan IT (ilmu teknologi) dan lain-lain”

Hal senada juga disampaikan oleh wakil kepala sekolah yaitu bapak ifan solihin yang menyatakan bahwa

“biasanya kami mengikuti seminar-seminar pendidikan biasanya kepala sekolah memilih langsung guru-guru yang ikut untuk

⁹⁶ Syafaruddin, *Efektivitas Kebjakan Pendidikan*, (Jakarta : PT. Rineka cipta, 2008), hal.82

menghadiri seminar pendidikan tersebut, biasanya 5, 3, bahkan 2 orang guru diutus untuk mengikuti kegiatan seminar, tepatnya tidak tentu. Biasa 2 bulan sekali bahkan 3 bulan sekali kalau saya tidak salah selalu ada kegiatan seminar guru yang diutus pun bergantian tidak guru itu-itu aja”

Ibu yaumi fitri selaku guru menyatakan hal yang sama

“Biasanya kepala sekolah menunjuk gur-guru untuk ikut seminar saya pernah ditunjuk untuk ikut seminar tentang pendidikan karakter, kami ada 3 orang yang pergi untuk mengikuti seminar tersebut”.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan kepala sekolah mengutus beberapa guru untuk menghadiri kegiatan seminar pendidikan dan seminar pendidikan biasa dilakukan 2 atau 3 bulan sekali.

Kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru yaitu dengan cara mengikut sertakan guru dalam kegiatan pendidikan dan latihan (diklat).

Sebagaimana wawancara kepala sekolah mengenai hal tersebut :

“tentu diklat itu pasti dilakukan biasanya ada jadwal untuk diklat. Biasanya yang mengadakan diklat kementrian pendidikan nasional, biasanya sih ada beberapa guru yang mengikutinya sesuai jadwal lah”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah yang mengatakan bahwa :

“tentu saja diklat itu dilaksanakan, bagaimana tidak karena tidak dilaksanakan pasti guru-guru ini pengetahuannya tidak berkembang. Jadi, kalau guru tidak melakukan diklat bagaimana pengetahuannya berkembang. Biasanya sih dilakukan sesuai jadwal diklat guru-guru”

Berdasarkan Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah mengikut sertakan guru-guru untuk mengikuti kegiatan diklat sebagai penambah pengetahuan dan pengembangan kompetensi profesioanl guru

Wawancara dengan kepala sekolah SMA di Yayasan Perguruan Utama Medan tentang sesuai apa tidak kebijakan dengan pengimplementasian kebijakan profesional guru di SMA yayasan Perguruan utama medan, sebagai berikut :

“jika berbicara mengenai pengimplementasian atau penerapan kebijakan, tentu awal dari kesiapan guru itu untuk membuat ikatan perjanjian dengan sekolah bahwasannya guru tersebut sanggup untuk mengikuti peraturan dan mekanisme, yang dilaksanakan di sekolah kita ini, misalnya : kehadiran kemudian disiplin dalam setiap kegiatan, disiplin waktu dan ketika ada hal hal yang mungkin perlu untuk memberikan masukan ya,.. kita lakukan itu kita musyawarah, berdiskusi dengan guru contoh seperti bagaimana sistem pembelajarannya itu diubah, dan buat strategi yang lain, teguran-teguran juga dilakukan berupa, peringatan tertulis dan tidak tertulis yaitu lisan itu kan untuk kebaikan kita bersama bukan menyudutkan tapi untuk mengambil solusi yang mana yang terbaik. Kebijakan yang telah dibuat tentu harus diterapkan”⁹⁷

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Yaumi Fitri selaku Guru di Sekolah Yayasan Perguruan Utama Medan yang menyatakan bahwa:

“Jika kita lihat dan kita perhatikan kalau kebijakan kepala sekolah selama ini yaa dari tahun 2012 masuk bapak itu sampai sekarang bagus, kebijakannya dalam mengembangkan kompetensi profesional keguruan ya, baik itu tentang kepada siswa, kebijakannya kepada siswa, kebijakannya kepada guru, kepala sekolah dan perangkat sekolah yang ada di sekolah inilah. Kalau saya amati, kepemimpinan bapak kepala sekolah bagus, yang pertama yaitu kepemimpinan itu, terlebih dahulu datang, kedisiplinan bapak kepala sekolah baik, dan udalam memproses anak anak juga baik ditannya kenapa naka anak atau (siswa) terlambat, yang ketiga untuk guru yang apabila ada guru yang tidak datang dipertanyakan kenapa tidak datang, untuk perangkat pembelajaran sekolah, bahwasannya kepala sekolah kita ini loyal, masalah apapun perangkat pembelajaran kita ikuti aturannya itu kalau dari dinas

⁹⁷Mohd, fadhli said, S.Ag, M.A, Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, wawancara di ruang kepala sekolah, hari kamis, tanggal 13 Februari 2019 Pukul. 10:20 WIB

pendidikan, pengawas pun jika datang kemari kita tunjukan apa yang diperlukan pengawas.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengimplementasian kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dapat dirasakan oleh setiap warga sekolah mulai dari peserta didik, guru, dan perangkat sekolah lainnya.

Pengimplementasiaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap tercapai apa tdaknyanya suatu kebijakan tersebut. maka kepala sekolah harus memberikan motivas terhadap bawahannya agar senantiasa tetap melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan

Sesuai dengan ungkapan kepala sekolah terkait hal tersebut beliau mengungkapkan bahwa

“ kebijakan yang telah saya buat harus tetap di laksanakan untuk itu saya akan memberi motivasi-motivasi agar guru-guru senantiasa mengikuti kebijakan saya tidak hanya itu saya juga memberikan penghargaan-penghargaan atau reaward kepada guru-gugu yang berkompeten dan selalu mengikuti aturan, dan yang tidak mengikuti aturan saya juga akan berikan hukuman ya, jadi guru yang bagus dan mengikuti aturan akan dapat bonus namun yang tidak bagus akan dapat hukuman apabila sudah patal kesalahannya maka mungkin bisa saja di pecat, dengan penuh pertimbngan. Tapi saya selaku kepala pasti memotivasi guru untuk tetap mengikuti aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan yang saya buat”.

Hal ini senada dengan apa yang diucapkan wakil kepala sekolah yang menyatakan bahwa

“ kepala sekolah pasti memberi masukan-masukan serta motivasi terhadap kami para guru agar senantiasa mengikuti aturan-aturan yang telah dibuatnya, jadi segala kelakuan kami pun terarah bahkan bisa saja nanti kepala sekolah kasih bonus buat kami yang istilahnya unggul lah dari guru-guru yang lain. Tapi bagi guru yang tidak mau mengikuti aturan biasanya kepala sekolah menegurnya sih, kepala sekolah juga sering menyindir-menyindir guru-guru yang dia itu Tidak Mengikuti aturan jadi bisa dibilang kepala sekolah sebenarnya

⁹⁸Yaumi Fitri Lubis, S.Pd, guru ekonmi di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, wawancara di ruang kepala sekolah, hari kamis, tanggal 12 Februari 2019 Pukul. 09:20 WIB

tegas juga dalam hal itu, namun mau bagaimana terkadang ada juga guru ini yang tidak open juga.

Salah seorang guru juga menyatakan hal yang sama terkait hal diatas

“ biasanya guru-guru yang tidak peduli diberi teguran sama kepala sekolah 1 bahkan sampai 3 kali teguran kalau guru itu tetap gak peduli juga mungkin dikeluarkan atau diberi surat pengunduran diri, namun biasanya lebih banyak yang guru mengikuti peraturan , walaupun ada satu dua guru yang mungkin tidak. Biasanya kalau gak bawa perangkat pembelajaran kenak tegur namun mau bagaimana lagi terkadang guru-guru ini banyak lupanya. Kepala sekolah nanti juga biasanya motivasi kami sih tuk tetap semangat mengajar, tuk tetap rajin mengikuti peraturan walaupun ada yang kek tadi saya bilang itu. Biasanya gajinya dilebihkan sih kalau kerjanya bagus”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengimplementasi kebijakan kepala sekolah juga memberikan motivasi serta reward terhadap guru-guru agar senantiasa mengikuti kebijakan kepala sekolah yang telah ditetapkan dan memberikan hukuman kepada yang tidak mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan.

3. Hambatan yang dihadapi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Kompetensi Profesional Guru

Wawancara dengan kepala sekolah SMA di Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu dengan Bapak Mohd. Fadhli Said S.Ag, M.A tentang apa saja yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, sebagai berikut :

“kalau,, faktor pendukung dalam mengembangkan kompetensi profesional ini ya tentu kita menyediakan perangkat pembelajaran, seperti buku pegangan guru, buku pegangan siswa seperti: LKS media pembelajaran seperti infocus kita sudah sediakan dan komputer kita harap guru-guru juga menggunakan komputer untuk lebih mudahnya proses pembelajaran karena itu juga termasuk pengembangan kompetensi, kalau penghambatnya si tidak terlalu banyak paling yaa mungkin faktor penghambat nya itu dari ketidak seriusan siswa, kenapa kita katakan ketidak seriusan kepada siswa karna kan banyak siswa ini masih banyak yang belum mengerti arti pembelajaran itu padahal tuas guru sudah baik, terkadang siswa itu tidak menanggapi dan menyahuti proses pendidikan itu misalnya, ada siswa yang sering terlambat, kehadiran, lalu untuk gurunya yang kita amati ya faktor penghambatnya itu yang adalah tidak

mengikuti disiplin, terlambat dan ada guru yang terlambat dengan banyak alasan disamping penguasaan IT guru-guru itu masih perlulah pembinaan dan pelatihan”.⁹⁹

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Yaumi selaku

Guru di Yayasan Perguruan Utama Medan ia mengatakan:

“Yaah, kalau masalah itu yaa mungkin ibu sendiri pun ya bukannya terlalu mengerti kali kan tentang prota, prosem dan seperangkat pembelajaran. Cuma sedikit sedikit ya taulah kita, karena kita gurukan harus memang tahu wajib mengetahui mengenai Seperangkat pembelajaran.ada guru memang dia sama sekali tidak mengerti, buat perangkat pun dia tidak mau. Tapi, seharusnya memang harus ada.jadi kebijakan kepala sekolah dalam mengetahui bagi guru yang tidak ada membuat RPP itu ya kita panggil dipanggil gurunya, jadi usahakanlah. Jadi usahakanlah.tapi, kalau guru bidang studi apapun harus ada perangkat pembelajarannya, soalnya itu kan termasuk dari kompetensi profesional. Kalau dulu perangkat pembelajaran, ditulis dibukuyang besar itu ditulis kita tulis tulis tangan .ituu masaa dulu, kalau sekarang kan tidak kita buka diinternet udah ada kita buka mata pelajaran in kan, kita buka yaudah kita buka ada. Tapi, tidak mungkin guru itu tidak ada perangkat pembelajarannya. Kalau tidak bisa membuat perangkat pembelajaran berarti dikuliah dulu tidak ada pembelajaran tentang membuat perangkat pembelajaran, dan gamungkin dikuliah itu kalian tidak ada belajar pembuatan perangkat pembelajaran kan.”¹⁰⁰

Wawancara mengenai hal tersebut salah seorang guru juga mengungkapkan hal yang sama yaitu

“ memang sebagai seorang guru kita harus betul-betul paham mengenai perangkat pembelajaran, sebagai seorang guru yang profesional sudah sepantasnya lah tahu mengenai perangkat pembelajaran. Namun tidak bisa dipungkiri juga memang masih banyak guru itu yang tidak tahu menahu tentang itu atau bahkan mungkin iya tahu namun malas membuat perangkat pembelajarankan, itulah perlu juga diperiksa secara menyeluruh mengenai hal ini, kebijakan kepala sekolah sih udah dibilang bagus lah mengenai hal ini, kepala sekolah kasih kami pelatihan, seminar biasa pun sesekali kalau pengawas datang ada juga monitoring gitu, jadi tergantung

⁹⁹Mohd, fadhli said, S.Ag, M.A, Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, wawancara di ruang kepala sekolah, hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Pukul. 10:20 WIB

¹⁰⁰ Yaumi Fitri Lubis, S.Pd, guru ekonmi di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, wawancara di ruang guru, hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019 Pukul. 10:20 WIB

gurunya juga, open apa tidak sama tugasnya, disini sih ada beberapa guru yang begitu namun tidak semualah.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memberi beberapa hal sebagai penunjang dalam mengembangkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran seperti LKS media pembelajaran seperti infocuskita sudah sediakan dan komputer kita harap guru-guru juga menggunakan komputer untuk lebih memudahkannya dalam proses pembelajaran. Namun hanya sebagian guru yang mampu menggunakan perangkat pembelajaran dan ada sebagian guru yang sama sekali tidak peduli terhadap perangkat pembelajarannya.

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah diharapkan dapat mengembangkan kompetensi profesional guru dengan secara menyeluruh. Dalam proses pengembangan kompetensi guru tidak sedikit rintangan yang dihadapi oleh kepala sekolah. Bahkan kepala sekolah mengatakan dalam wawancara yaitu

“ Tidak mudah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru walaupun kita telah buat kebijakan tapi ada saja rintangannya, bahkan rintangannya ini pun dari guru tersebut, maksudnya gini sudah di buat aturan, sudah dibuat kebijakan tapi malah guru tersebut yang langgar, walaupun sudah diberi imbalan bagi yang mematuhi, dan ganjaran bagi yang tdak mematuhi, tetap saja, mau bagaimana lagi , walaupun ada 3 bahkan 2 guru yng begitu namun saya harap sih semoga guru tersebut jera lah karena diberi hukuman.”

Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh wakil kepala sekolah, yang menyatakan bahwa

“ Memang kebijakan kepala sekolah sudah bagus namun ada saja yang tidak mau mengikuti peraturan, tapi itulah tadi ada hukuman dan ada penghargaan, terkadang guru ini juga karena iya mungkin mengajar tidak disini saja mungkin dia ngajar di sekolah lain, jadi dia tidak fokus terhadap sekolah ini, kadang tidak mengikuti aturan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru juga di dapat dari beberapa guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Wawancara dengan guru di Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu dengan ibu Gustiani S.Pd tentang : Sangksi apa saja yang akan diberikan bapak kepala sekolah kepada guru jika di SMA yayasan Perguruan Utama Medan ini buk ada ditemukan guru yang kurang memiliki rasa peduli terhadap pekerjaan dan kurang rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan buk ?

Berikut Jawaban dari ibu gustina sebagai Tata Usaha di Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu dengan ibu Gustina sebagai berikut :

“Yaaaa, yang pertama yaitu yaa dipanggil ya, diberi nasehat-nasehat, ditanya-yanya beliau itu, cara ngasinya itu kek mana yaa motivasi nya itu dibuatnya guru itu, dikasih nya ada tambahan tambahan, diajak rekreasi nasehat nasehat, beliau dalam menyikapi suatau permasalahan yaaa diadakanya Musyawarah, tidak diselesaikan dengan kepala sendiri. Gak memecahkan sendiri. Yaa musyawarah laah.”

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ifan Solihin selaku Wakil Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa :

“ Bicara shering, “apa kendalanya atau permasalahan sehingga terjadi kepada ibu kurang rasa tanggung jawab” peringatan pertama menggunakan SP 1. setelah dipanggil kita cari solusinya apa. ketika dilakukan lalu jika dilakukan ke dua akan dipanggil lagi menggunakan SP 2, sampai sp 3 nah di SP 3 nanti baru kita tanyak apakah ibu masih mau mengajar atau tidak? Kalau tidakita kasi surat pengunduran diri bukan dipecat tapi surat pengunduran diri atau surat permohonan pengundaran diri bahwasannya dia tidak sanggup untuk menjalani aturan peraturan disekolah. Kan kita ada aturan kita panggil. Karna kita kan ada kumpul dengan yan lagi zamannya itu bahasa kerennya sekrang apa namanyaa ituu,,Emmm haa “bearifing” kadang kadangkana guru yang terlambat itu langsung bearifing kami, kepala sekolah, pks, dan guru

yang telat pada waktu itu. Bereafing. Setelah itu apa kesimpulannya “jangan sampai terulang kembali”¹⁰¹

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru, kepala sekolah melakukan sharing serta menanyakan kepada guru apa-apa kendala oleh guru mengapa sampai melanggar peraturan walaupun ada beberapa guru yang tidak peduli namun kebijakan kepala sekolah ini sudah terbilang cukup baik dalam mengembangkan kompetensi profesional guru.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian di lapangan dapat didapatkan beberapa temuan bahwa:

1. Kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Penelitian yang relevan dalam skripsi yang disusun oleh Hana Cahya Mustaqim, 2017, “ Peran Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru “ mengemukakan bahwa peran kepala sekolah sebagai *manager* memiliki strategi yang tepat untuk memperdayakan tenaga kependidikannya, sebagai administrator kepala sekolah menyusun seluruh program sekolah, sebagai supervisor mengetahui kelemahan dan keunggulan guru, sebagai leader memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, dan sebagai innovator memiliki strategi-strategi dalam mengembangkan dengan inovatif.

¹⁰¹ Ifan Solihin

Dalam hal ini kepala sekolah memiliki peran penting dalam membuat sebuah kebijakan dan kepala sekolah sudah bertugas dengan baik dengan membuat kebijakan dengan cara memonitoring keaktifan mengajar guru ini bisa dibilang kepala sekolah telah melakukan tugasnya sebagai supervisor.

Kepala sekolah dalam membuat suatu kebijakan tentu mempertimbangkan hal-hal yang penting, maka dari itu sebelum membuat kebijakan kepala sekolah melakukan proses pembuatan kebijakan melalui tahap yang harus dilalui kepala sekolah yaitu dengan penyusunan agenda

Adapun tahap proses pembuatan kebijakan kepala sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu :

- 1) Adanya kegiatan Diskusi mengenai kebijakan yang dibuat
- 2) Mengadakan rapat guru / Musyawarah
- 3) Melakukan mentoring serta pengawasan terhadap guru sehingga kepala sekolah dapat menentukan

Adapun kebijakan yang di tetapkan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan yaitu:

- 1) Mewajibkan guru untuk disiplin dalam melaksanakan tugas
- 2) Mengikutkan guru-guru dalam kegiatan seminar-seminar pendidikan dan workshop
- 3) Mengikutkan guru-guru KKG
- 4) Mengikutkan guru-guru pendidikan dan pelatihan (diklat)

Berdasarkan temuan penelitian yang peneliti temukan bahwa tersebut dapat diketahui kepala sekolah sangat-sangat menginginkan tenaga

kependidikannya menjadi guru yang memiliki kompetensi profesional. Agar kebijakan ditetapkan kepala sekolah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, beliau membrikan motivasi, reward, penghargaan kepada guru.

2. Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Kebijakan Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Berdasarkan penelitian di lapangan peneliti dapat beberapa temuan bahwa bahwa dalam mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru yaitu dengan kembali kediri masing-masing guru nya, yang menunjukkan tentang dilihat dari kesiapan guru yang ada di sekolah itu untuk membuat ikatan perjanjian dengan sekolah bahwasannya guru yang ada disekolah tersebut sanggup untuk mengikuti peraturan dan mekanisme. Seperti : kedisiplinan kunci utama, dan membuat strategi, serta adanya teguran-teguran yang dilaukan kepala sekolah berubah peringatan tertulis dan tidak tertulis yaitu lisan untuk kebaikan kita bersama bukan menyudutkan tapi untuk mengambil solusi yang mana yang terbaik.

Jadi penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pembahasan tentang kepala sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan profesional guru adalah dengan dari kepala sekolah sendiri, kepala sekolah dalam menerapkan kebijakan itu, bahwasannya kepala sekolah lebih menilai dan melihat dari kesiapan guru yang ada di sekolah, untuk membuat ikatan perjanjian dengan sekolah. Adapaun penerapan kebijakan yang dilaksanakan kepala sekolah adalah dengan cara membuat dan memberikan peringatan tertulis, dan tidak tertulis jika tidak tertulis lebih untuk memberi arahan arahan, motivasi.

Berikut ini program kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kepala sekolah adalah

- a) Kepala Sekolah Membimbing tenaga kependidikan dalam hal menyusun program kerja dan melaksanakan tugas sehari-hari. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler, OSIS dan mengikuti lomba di luar sekolah. Kepala sekolah
- b) Mengembangkan pendidik/tenaga kependidikan melalui pendidikan/latihan, pertemuan, seminar dan diskusi, menyediakan bahan bacaan, memperhatikan kenaikan pangkat, mengusulkan kenaikan jabatan melalui seleksi calon
- c) Kepala Sekolah Mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan/latihan, pertemuan, seminar diskusi
- d) kepala sekolah Mengelola administrasi bidang kesiswaan, bimbingan konseling, kegiatan ekstra kurikuler dengan memiliki data administrasi bidang kesiswaan, bimbingan konseling dan kegiatan ekstra kurikuler secara lengkap.
- e) Kepala Sekolah Mengelola administrasi bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran dengan memiliki data lengkap bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran.

- f) kepalasekolah mengelola administrasi bidang pendidik dan tenaga kependidikan dengan memiliki data lengkap bidang pendidik dan tenaga kependidikan
- g) Mengelola administrasi bidang sarana dan prasarana dengan memiliki data lengkap bidang sarana dan prasarana Mengelola administrasi bidang keuangan dengan memiliki data lengkap bidang keuangan Menyusun program kerja, baik.
- h) Menyusun personalia kegiatan temporer (Panitia Ujian, panitia peringatan hari besar nasional atau keagamaan dan sebagainya) Menyusun program supervisi kelas, pendidik, tenaga kependidikan, kegiatan ekstra kurikuler dan sebagainya.
- i) Melaksanakan program supervisi kelas, pendidik, tenaga kependidikan, kegiatan ekstra kurikuler dan sebagainya.
- j) Memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja pendidik/tenaga pendidik untuk pengembangan sekolah.
- k) Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggungjawab, berani mengambil resiko dan berjiwa besar.
- l) Memahami kondisi anak buah, baik pendidik, tenaga kependidikan dan siswa. Kepala sekolah.
- m) Memahami visi, misi, dan tujuan sekolah yang diemban.

3. Hambatan yang di hadapi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Berdasarkan penelitian di lapangan peneliti dapat beberapa temuan bahwa dapat dilihat bahwa ada faktor pendukung dalam mengembangkan kompetensi profesional ini, yaitu : sekolah ya tentu menyediakan perangkat pembelajaran, seperti buku pegangan guru, buku pegangan siswa seperti: LKS media pembelajaran seperti infocus, dan komputer untuk dari itu maka diharapkan guru-guru juga menggunakan komputer untuk lebih mudahnya proses pembelajaran. karena itu juga termasuk pengembangan kompetensi, kalau penghambatnya tidak terlalu banyak paling mungkin faktor penghambatnya itu dari ketidakseriusan siswa, kenapa dikatakan ketidakseriusan kepada siswa karena banyak siswa ini masih banyak yang belum mengerti arti pembelajaran itu padahal tugas guru sudah baik, terkadang siswa itu tidak menanggapi dan menyahuti proses pendidikan itu misalnya, ada siswa yang sering terlambat, kehadiran, lalu untuk gurunya yang kita amati ya faktor penghambatnya itu yang adalah tidak mengikuti disiplin, terlambat dan ada guru yang terlambat dengan banyak alasan disamping penguasaan IT guru-guru masih perlu adanya pelatihan dan pembinaan.

Ada guru yang ditemukan masih tidak mengikuti peraturan serta tidak disiplin, terlambat dengan banyak alasan. Serta juga faktor yang penghambatan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru adanya guru yang kurang atau rendah dalam menguasai IT intinya masih perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pembinaan. untuk

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru atau kemampuan dari guru.

Berdasarkan dengan kebijakan kebijakan kepala sekolah menurut peneliti sudah dapat dikatakan berhasil namun masih perlu ditingkatkan lagi kedepannya. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti waktu di lapangan bahwa guru-guru selalu dilibatkan dalam rapat/musyawarah dalam pengambilan keutusan dalam pemecahan masalah yang ada, serta emberikan kesempatan pada guru untuk mengaplikasikan dan mengeluarkan potensi-potensi yang mereka miliki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian, maka secara umum dapat disimpulkan :

1. Kebijakan kepala sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru yaitu guru wajib mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan, Mengikutkan guru dalam kegiatan seminar merupakan salah satu cara atau kebijakan yang dapat dilakukan kepala sekolah untuk mengembangkan kompetensi profesional guru. guru wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan, bahwa kepala sekolah juga mengutus guru-guru untuk mengikuti pelatihan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sebagai guru. Kebijakan sekolah dalam hal lain seperti guru wajib datang tepat waktu dan disiplin. Proses penetapan kebijakan yaitu dengan penyusunan agenda melalui pengadaaan diskusi, musyawarah guru pelajaran (MGMP), rapat guru, melakukan proses pembelajaran serta mengadakan evaluasi hasil belajar siswa pada pertengahan semester.

2. Berkenaan dengan pengimplementasian kebijakan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan, adalah sebagaiberikut :

Kebijakan mengikuti seminar-seminar pendidikan sudah ada dilakukan kepala sekolah mengikut sertakan guru dalam seminar yang biasa di lakukan 32 bahkan 3 bulan sekali. Mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sudah ditentukan jadwalnya dan pengimplementasian kebijakan yang lain seperti :

kedisiplinan kunci utama, dan membuat strategi, serta adanya sanksi berupa teguran-teguran yang dilakukan kepala sekolah berubah peringatan tertulis dan tidak tertulis yaitu lisan untuk kebaikan kita bersama bukan menyudutkan tapi untuk mengambil solusi yang mana yang terbaik..

3. Adapun faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru di SMA Yayasan Perguruan Utama Medanantara lain : ada guru yang ditemukan masih tidak mengikuti peraturan serta tidak disiplin, terlambat dengan banyak alasan padahal sudah ada sanksi bagi yang terlambat Serta juga faktor yang penghambatan kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru adanya guru yang kurang atau rendah dalam menguasai IT sehingga segala tugasnya terkait dengan IT itu terbengkalai masih perlu adanya pelatihan-pelatihan dan pembinaan.untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru atau kemampuan dari guru.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliitian dari pembahasan hasil peneltian di atas, maka ada beberapa sasaran yang peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian, yaitu :

1. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam mendidik, mengajar, melatih, menegvaluasi, dan mengembangkan potensi siswa di sekolah. Oleh karena itu peneliti memberi saran agar para guru-guru yang ada di SMA Yayasan Perguruan Utama Medan hendaknya terus untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi /kemampuan serta kualitas sumber daya manusia yang bermutu.

2. Pengembangan dan peningkatan kegiatan guru dapat lebih diikutsertakan bukan hanya pada dalam kegiatan MGMP, pelatihan pelatihan, musyawarah dan pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang terkait dengan peningkatan dan pengembangan profesional guru. Dengan adanya hambatan dalam kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi profesional guru semoga sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan menjadi pemicu untuk mencari solusi dengan bekerjasama dengan pihak terkait jika adanya terjadi suatu permasalahan pendukungnya semoga menjadi kekuatan untuk mengajak seluruh *Stakeholder* dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepeimpinan Pendidikan Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*, (Cet.I ; Bandung : Alfabeta: 2008)
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)
- Basri Hasan. 2014. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. (Bandung: CV Pustaka Setia 2003),
- Danim Sudarwan, *Pengembangan Profesi Guru dari PRA. Jabatan, Induksi, Ke Profesional Madani*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011)
- Daryanto, *administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Departemen Pendidikan dan NasionalRI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga* (Jakarta : Balai Pustaka, Cet IV. 2007)
- Dr. H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2009)
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003) Hamka abdul Aziz, *karakter guru profesional* , (Jakarta: Al-mawardi, 2016)
- Fakultas Tarbiyah UIN Malang, *El-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Keagamaan* (Malang: Jurnal, 2007)
- H.U. Husna Asmara, *Profesi Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*,(Jakarta: PT. bumi aksara, 2008)
- Hari Suderadjat, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005)
- Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru sekolah dasar*, (Jakarta: bumi aksara, 2005)
- Imron Ali, *Kebijkasanaan Pendidikan di Indonesia Proses, Produk dan Masa depannya*,(Jakarta: Bumi Aksara. 2008)
- Jamil Suprihatiningrum, *gutu profesional*, (Depok: Ar Ruuz-Media, 2010)
- Jemmy Rumengan, (2010), *Metodologi penelitian dengan SPSS*, Batam: UNIBA PRESS

- Kusnandar, *Guru Profesional implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007)
- Masganti, *Metode Penelitian pendidikan Islam*, (Medan: IAIN PRESS, 2012)
- Moh Ozer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012)
- Muhaimin, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda karya, 1993)
- Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009)
- Oemar Hamalik, *Pendidikan guru: berdasarkan pendekatan kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 *tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala sekolah/Madrasah*
- Rusman, *model-model pembelajaran*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada, 2012)
- Sagala Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. (Bandung: Cv. Alfabeta. 2005)
- Salim dan syahrums. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007)
- Sudarwan danim, *Pengembangan Profesi Guru*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2011)
- Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2014)
- Suharsaputra Uhar. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan (Mengembangkan Spirit Entrepreneurship Menuju Learning)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016)
- Sumber: *1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad)* - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press
- Suparlan, *Menjadi Guru Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat, 2008)
- Syafaruddin Nuridin dkk, *guru profesional dan implementasi kurikulum*, (Jakarta: ciputat Pers, 2002)
- Syafaruddin, *Evektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Efektif*, (Jakarta: Rineka, 2008)
- Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi pengembangan profesi pendididkan*, (Jakarta: Perdana Media grub, 2011)

Undang-Undang Dasar RI 1945, pasal 31 ayat 1 dan 3. (Jakarta: Permata Press, 2009)

Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-undang sisdiknas (*sistem pendidikan nasional*) No.20 Thn.2003. (Jakarta: Rineka Cipt, 2010)

Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Wina sanjaya, *Pembelajaran berorientasi standar proses pendidik*, (Jakarta: kencana perdana media, 2011)

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1.Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH SMA YAYASAN PERGURUAN UTAMA MEDAN

A. Identitas Wawancara

Informan : Fadly Said Lubis S.Ag. M.Pd

Hari/ Tanggal : Senin 5 februari 2019

Waktu Observasi : 10.00 (Waktu jam Istirahat)

Jabatan : Kepala Sekolah

Tempat : Ruang Kepala Sekolah

B. Pertanyaan dengan Kepala Sekolah

1. Bagaimana Keadaan Kompetensi Profesional guru yang dimiliki oleh guru-guru di SMA Yayasan perguruan utama medan ini pak?
2. Bagaimana Bapak dalam mengimplementasikan kebijakan profesional guru di sma yayasan perguruan utama medan?
3. Bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di SMA Yayasan perguruan utama medan ?
4. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bapak dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di sma yaysan perguruan utama medan ini pak?
5. Manajemen yang bapak lakukan untuk mengembangkan kompetensi guru di SMA yayasan perguruan utama medan ini seperti apa pak?
6. Kemudian, mengenai kompetensi guru khususnya kompetensi profesional guru, menurut bapak apa arti penting dari kompetensi guru?

7. Usaha usaha apa saja yang bapak tempuh dalam mengembangkan profesional guru?
8. Faktor apa saja yang mendukung usaha bapak dalam membina dan mengembangkan profesional guru dalam mengembangkan khusus ke kinerja gurunya pak ?
9. Bagaimana dan apa saja kebijakan yang bapak laksanakan dalam mengembangkan kompetensi profesional guru di sma yayasan perguruan utama medan?
10. Bagaimana cara bapak sebagai kepala sekolah dalam memberikan kontribusi kewenangan terhadap rekan kerja bapak yaitu guru di sma yayasan perguruan utama medan ini pak?
11. Bagaimana cara bapak dalam menjalankan proses penetapan kebijakan?
12. Kebijakan apa saja yang bapak buat di sma yayasan perguruan utama medan agar guru-guru di sekolah ini menjadi guru yang profesional ?
13. Bagaimana cara bapak dalam menjalankan proses untuk menetapkan suatu kebijakan?
14. Bagaimana cara bapak selaku kepala sekolah dalam menyusun mekanisme pembuatan keputusan?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN IPS SMA
YAYASAN PERGURUAN UTAMA MEDAN**

A. Identitas Wawancara

Informan : Fitri S.Pd
Hari/ Tanggal : Rabu 14 Maret 2019
Waktu Observasi : 10.00 (Waktu jam Istirahat)
Jabatan : Guru Ekonomi
Tempat : Ruang Guru

B. Pertanyaan dengan Guru

1. Begini bu, saya ingin mengetahui tentang kebijakan kepala sekolah di sma yayasan perguruan utama medan ini bu?
2. Bagaimana kepala sekolah di sma yayasan perguruan utama medan ini dalam memimpin sekolah ini?
3. Bagaimana kepala sekolah di sma yaysan perguruan utama medan ini dalam menetapkan suatu kebijakan bu?
4. Bagaimana cara bapak kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah bu?
5. Bagaimana cara kepala sekolah di yayasan perguruan utama medan ini menyelesaikan dan menyikapi jika ada suatu permasalahan yang terjadi bu?
6. Apa saja kebijakan kepala sekolah disini bu?
7. Kalau boleh tahu bagaimana respon ibu mengenai kebijan kepala sekolah ?
8. Apakah kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah itu membawa dampak baik buat sekolah?

9. Bagaimana menurut ibu sikap kepala sekolah apabila terdapat warga sekolah yang tidak mau mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan?
10. Bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah?
11. Menurut ibu apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kompetensi guru?
12. Menurut ibu apakah respon yang diberikan warga sekolah terkhususnya guru mengenai kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah?
13. Apa saja buksangsi yang di berikan kepala sekolah kepada guru yang belum dapat memfasilitatori dan menjelaskan kepada siswa tentang pokok peembahasan yang di bahas dalam pemebelajaran ?

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU MATA PELAJARAN IPA SMA
YAYASAN PERGURUAN UTAMA MEDAN**

A. Identitas Wawancara

Informan : Augustina S.Pd
Hari/ Tanggal : Rabu 21 Maret 2019
Waktu Observasi : 10.00 (Waktu jam Istirahat)
Jabatan : Guru IPA
Tempat : Ruang Guru

B. Pertanyaan dengan Guru

1. Begini buk, saya ingin mengetahui tentang kebijakan kepala sekolah di sma yayasan perguruan utama medan ini buk?
2. Bagaimana kepala sekolah di sma yayasan perguruan utama medan ini dalam memimpin sekolah ini?
3. Bagaimana kepala sekolah di sma yaysan perguruan utama medan ini dalam menetapkan suatu kebijakan buk?
4. Bagaimana cara bapak kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah buk?
5. Bagaimana cara kepala sekolah di yayasan perguruan utama medan ini menyelesaikan dan menyikapi jika ada suatu permasalahan yang terjadi buk?
6. Apa saja kebijakan kepala sekolah disini bu?
7. Kalau boleh tahu bagaimana respon ibu mengenai kebijan kepala sekolah ?
8. Apakah kebijakan yang ditetapkan kepala sekolah itu membawa dampak baik buat sekolah?

9. Bagaimana menurut ibu sikap kepala sekolah apabila terdapat warga sekolah yang tidak mau mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan?
10. Bagaimana teknis pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah?
11. Menurut ibu apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan kompetensi guru?
12. Menurut ibu apakah respon yang diberikan warga sekolah terkhususnya guru mengenai kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah?
13. Apa saja buk sangsi yang di berikan kepala sekolah kepada guru yang belum dapat memfasilitatori dan menjelaskan kepada siswa tentang pokok peembahasan yang di bahas dalam pemebelajaran ?

Lampiran 2 Observasi**DAFTAR OBSERVASI**

Pengamat ; Mutiara Annisa

Tempat ;SMAYayasan Perguruan Utama Medan jalan Suluh

.Setting dan peristiwa yang diamati :

1. Keadaan fisik sekolah.
 - a. SuasanaLingkungan SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
 - b. Ruang kelas beserta Sarana dan Prasarana
 - c. Hiasan dan tulisan yang dipasang (Mading)
2. Upacara dan Ritual
 - a. Upacara bendera hari senin
 - b. Upacara hari guru
 - c. Kegiatan hari guru
 - d. Kebiasaan memulai dan mengahiri pembelajaran
3. Suasana kegiatan proses Belajar dan Mengajar
 - a. PMB (Proses Belajar Mengajar) oleh guru bidang studi
 - b. Kegiatan praktikum di Lab
 - c. Kegiatan kokurikuler dan extra kulikuler

Lampiran 3 Daftar Dokumen

DAFTAR DOKUMEN

Jenis Dokumen :

1. Bagian Manajemen
 - a. Rumusan Visi dan Misi
 - b. Kebijakan sekolah
2. Data Kesiswaan
 - a. Jumlah kelas dan jumlah siswa
3. Data Ketenagaan
 - a. Kepala sekolah beserta biodatanya
 - b. Guru (tingkat pendidikan, pengalaman dan tugas)
4. Organisasi
 - a. Struktur Organisasi madrasah dan rincian tugas
5. Sarana dan prasarana sekolah
 - a. Sarana dan alat alat pembelajaran
 - b. Gedung dan ruang SMA yayasan Perguruan utama Medan
 - c. Sarana dan fasilitas penunjang lainnya
6. Sejarah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan

Lampiran 4 Catatan Lapangan**CATATAN LAPANGAN 1**

Tanggal : 5 Februari 2019
Waktu : 10.20-11.00
Tempat : SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Kegiatan : Memulai penelitian dengan Kepala Sekolah

Pada hari senin tepatnya pada tanggal 5 Februari 2019 peneliti datang ke SMA Yayasan Perguruan Utama Medan untuk Melakukan wawancara terhadap Kepala sekolah kepala sekolah menyambut dengan ramah dan menerima peneliti untuk melakukan penelitian dengan beliau atau kepala sekolahnya dan kemudahan berlangsunglah peneliti mewawancarai kepala sekolah pada hari kamis itu.

CATATAN LAPANGAN 2

Tanggal : 13 Februari 2019
Waktu : 10.20-11.00
Tempat : SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Kegiatan : Penelitian kedua dengan Wakil Kepala Sekolah

Pada hari selasa tepatnya pada tanggal 13februari 2019 peneliti datang kembali ke SMA Yayasan perguruan utama medan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah . peneliti melangsungkan wawancara dengan beliau pada saat jam istirahat dikarenakan pada saat jam tersebut beliau (wakil kepaala sekolah) memiliki waktu luang untuk diwawancarai adapun lokasi peneliti mewawancarai yaaitu di ruang guru dan setelah mendapatkan informasi dan data yang sudah peneliti anggap cukup kemudian peneliti pulang dan tidak lupa mengucapkan terimakasih yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti wawancarai.

CATATAN LAPANGAN 3

Tanggal : 20 Februari 2019
Waktu : 10.20-11.00
Tempat : SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Kegiatan : Penelitian dengan Kepala Sekolah

Pada hari Selasa tepatnya pada tanggal 20 Februari 2019 peneliti datang kembali ke SMA Yayasan Perguruan Utama Medan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah. Kepala Sekolah dengan sangat baik dan ramah menerima peneliti dan memberikan jawaban yang ditanyakan peneliti sesuai pedoman wawancara yang ada.

Peneliti melangsungkan wawancara dengan beliau pada saat jam istirahat dikarenakan pada saat jam tersebut beliau (Kepala Sekolah) memiliki waktu luang untuk diwawancarai. Adapun tempat peneliti mewawancarai yaitu di ruang Kepala Sekolah dan setelah mendapatkan informasi dan data yang sudah peneliti anggap cukup kemudian peneliti pulang dan tidak lupa mengucapkan terimakasih yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti wawancara.

CATATAN LAPANGAN 4

Tanggal : 14 Maret 2019
Waktu : 10.20-11.00
Tempat : SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Kegiatan : Memulai penelitian dengan guru ekonomi

Pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 14 Maret 2019 peneliti datang kembali ke SMA Yayasan Perguruan Utama Medan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan guru. Peneliti melangsungkan wawancara dengan guru pada saat jam istirahat dikarenakan pada saat jam

tersebut beliau (guru) memiliki waktu luang untuk diwawancarai adapun lokasi peneliti mewawancarai yaitu di ruang guru dan setelah mendapatkan informasi dan data yang sudah peneliti anggap cukup kemudian peneliti pulang dan tidak lupa mengucapkan terimakasih yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti wawancara.

CATATAN LAPANGAN 5

Tanggal : 21 maret 2019
Waktu : 10.20-11.00
Tempat : SMA Yayasan Perguruan Utama Medan
Kegiatan : Memulai penelitian dengan guru IPA

Pada hari Rabu tepatnya pada tanggal 21 Maret 2019 peneliti datang kembali ke SMA Yayasan perguruan utama medan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan guru . peneliti melangsungkan wawancara dengan guru pada saat jam istirahat dikarenakan pada saat jam tersebut beliau (guru) memiliki waktu luang untuk diwawancarai adapun lokasi peneliti mewawancarai yaitu di ruang guru dan setelah mendapatkan informasi dan data yang sudah peneliti anggap cukup kemudian peneliti pulang dan tidak lupa mengucapkan terimakasih yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti wawancara.

Lampiran 5 Dokumentasi

DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Lapangan Bola Kaki SMA Yayasan Perguruan Utama Medan



Gambar 2

Lokasi Depan Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan



Gambar 3

Lapangan Badminton Sekolah



Gambar 4
Suasana Ruangan Guru



Gambar 5
Lokasi Parkiran Sepeda Motor



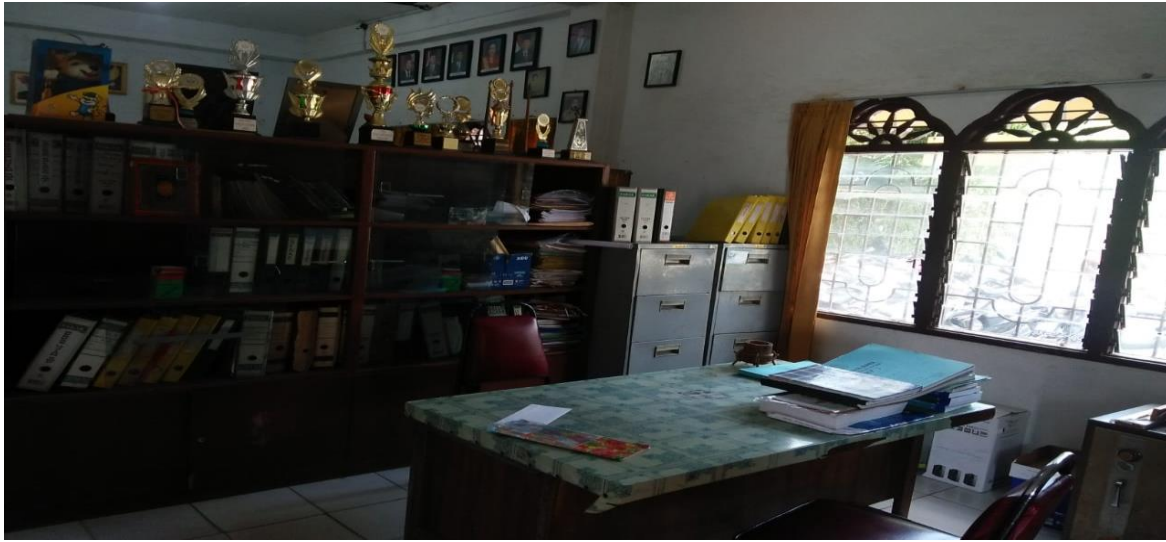
Gambar 6

Suasana Upacara Bendera



Gambar 7

Ruangan Tata Usaha



Gambar 9
Berkas berkas sekolah



Gambar 10
Ruang Kepala Sekolah



Gambar 11
Meja Kepala Sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan



Gambar 12
Suasana Apel Pagi Rutin





Gambar 13

Kegiatan Peneliti Mewawancarai Kepala Sekolah





Gambar 14

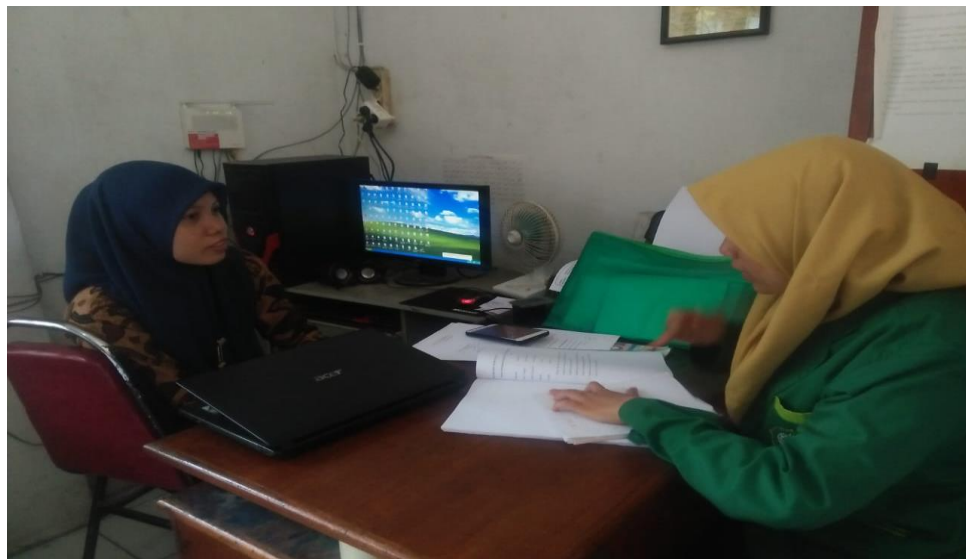
Salaman dengan Guru Ekonomi dan sekaligus wawancara di sekolah SMA Yayasan Perguruan Utama Medan



Gambar 15
Kegiatan Wawancara Wakassek



Gambar 16
Kegiatan Wawancara dengan Guru TIK sekaligus Kepala Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**BIODATA**

Nama : Mutiara Annisa
NIM : 37.15.3.041
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Itam Ulu, 8 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Jumarlan
Pekerjaan : Karyawan
Nama Ibu : Suharni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Pulau Sejuk

PENDIDIKAN

2001-2008 : SD 010193 Tanah Itam Ulu
2009-2011 : MTs Lima puluh
2012-2015 : MAN Lima Puluh
2015-2019 : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 10 Maret 2019

Mutiara Annisa
NIM 37.15.3.041